



UNIVERSITAS INDONESIA

**INTERVENSI DAN LIMITASI : MEMPERTIMBANGKAN
KEMBALI POLITIK SEBAGAI PIKIRAN**

SKRIPSI

**IRSYAD
0806353141**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**INTERVENSI DAN LIMITASI : MEMPERTIMBANGKAN
KEMBALI POLITIK SEBAGAI PIKIRAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora pada Program Studi Ilmu Filsafat**

**IRSYAD
0806353141**

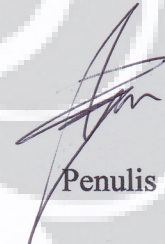
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Juli 2012



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Irsyad
NPM : 0806353141
Tanda Tangan : 
Tanggal : 4 Juli 2012

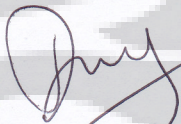
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Irsyad
NPM : 0806353141
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Intervensi dan Limitasi : Mempertimbangkan Kembali Politik Sebagai Pikiran.

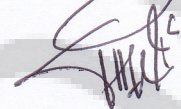
Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

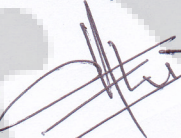
Pembimbing : Dr. Donny Gahral Adian

()

Penguji : Taufik Basari, SH, LL.M

()

Penguji : Fristian Hadinata, M.Hum

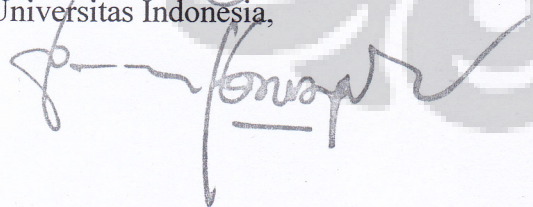
()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 4 Juli 2012

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia,



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Pertama kali saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah mentolerir begitu banyak waktu bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Toleransi tersebut membuat saya masih masuk dalam kemungkinan untuk *selesai* dalam delapan semester. Tentu penulisan skripsi ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi saya pribadi, sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mungkin masih berada dalam bab niat semata. Oleh karena itu, melalui bagian ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Donny Gahril** yang telah memberikan waktunya untuk rangkaian bimbingan yang sederhana namun tidak pernah *dangkal* dalam setiap pertemuan, saya sangat beruntung dapat memperoleh kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan beliau.
2. Bapak **Taufik Basari** selaku penguji tulisan ini yang telah memberikan masukan yang mendasar, terutama dalam konsep matematika itu sendiri.
3. Bung **Fristian Hadinata** yang juga selaku penguji tulisan ini. Terima kasih atas pembacaan kritisnya terhadap skripsi ini. Sebuah kritik yang membuat saya tak pernah puas akan filsafat.
4. Dosen-dosen di departemen filsafat yang telah memberikan kerangka bagi saya dalam membangun jalan pikiran yang logis terhadap tulisan ini. Semoga filsafat memang hendaknya menjadi sebuah sikap hidup, bukan gaya hidup semata.

Selanjutnya teman-teman filsafat UI, khususnya angkatan 2008 yang memiliki keunikan sebagai *human being*. Kepada **Melysha** saya ucapkan terima kasih, berkat diskusinya saya dapat menyelesaikan tulisan ini, namun jika tak berdiskusi pun saya dapat lulus tepat waktu (jangan dianggap serius). Kepada **Sona**, teman seperjuangan dalam menikmati teh hangat di rumah Pak Donny dalam setiap bimbingan. Kepada **Dona**, yang memberikan gambaran tentang pengertian *waktu* bagi manusia. Kepada **Hario, Nurul, Okvi, Indah, Ajeng, Daru, Agung, Pepeng, Sopa, Erby, Juwi, Bone, Dadah, dan teman-teman lainnya** yang tidak dapat disebut satu persatu dalam bagian ini.

Kepada **Alfin Abrar** (mahasiswa teknik elektro UI) yang memberikan interpretasi jelas terhadap teori himpunan, *continuum hypothesis*, *forcing* hingga limit dalam matematika, kepada **Vina Yusrika** atas bantuan dalam berbagai hal yang fundamental dalam skripsi ini. Teman-teman lainnya seperti **Iqbal, Randy, Edo, Dodi, my Brother Ichsan Gunawan** (*hopefully you are not the next of ichsanoodin noorsy*).

Mungkin sebagai penutup, saya ucapkan sujud syukur atas terlahirnya dari rahim seorang wanita bernama **Wiskhernis** (nama eksistensial yang mungkin hanya satu-satunya di dunia ini). *Thank you so much Mom.* (alm) ayah, **Iryenal**, maaf baru teringat untuk memakai namamu di belakang kecerdasan ini. Semoga ilmu kita bisa memegahkan alam istirahat hingga bertemu di akhirat nanti. **My sisters, Eka Fitria dan Fathya Annisa**, semoga saya terus menjadi laki-laki yang *respect* terhadap perempuan melalui kalian berdua.

Baiklah, cukup sekian terima kasih ini. Semoga tulisan ini lebih dari sekedar ucapan terima kasih.

Depok, 4 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyad
NPM : 0806353141
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Ilmu Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Limitasi dan Intervensi : Mempertimbangkan Kembali Politik Sebagai
Pikiran**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Irsyad)

vii

ABSTRAK

Nama : Irsyad
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Intervensi dan Limitasi : Menimbang Kembali Politik
Sebagai Pikiran

Skripsi ini membahas filsafat politik yang diperkenalkan oleh Alain Badiou, serta penegasan pemikiran tersebut dengan teorema limit matematika. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dimana keseluruhan penelitian berdasarkan sintesa dari berbagai literatur yang menjadi sumber utama penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dan keadilan adalah suatu relasi mutlak dimana keadilan adalah konsep yang harus selalu hadir dalam pikiran politik, relasi tersebut berasal dari sebuah prosedur yang dibangun oleh material seperti konsep intervensi dan limitasi yang bersandar pada matematika sebagai ontologi.

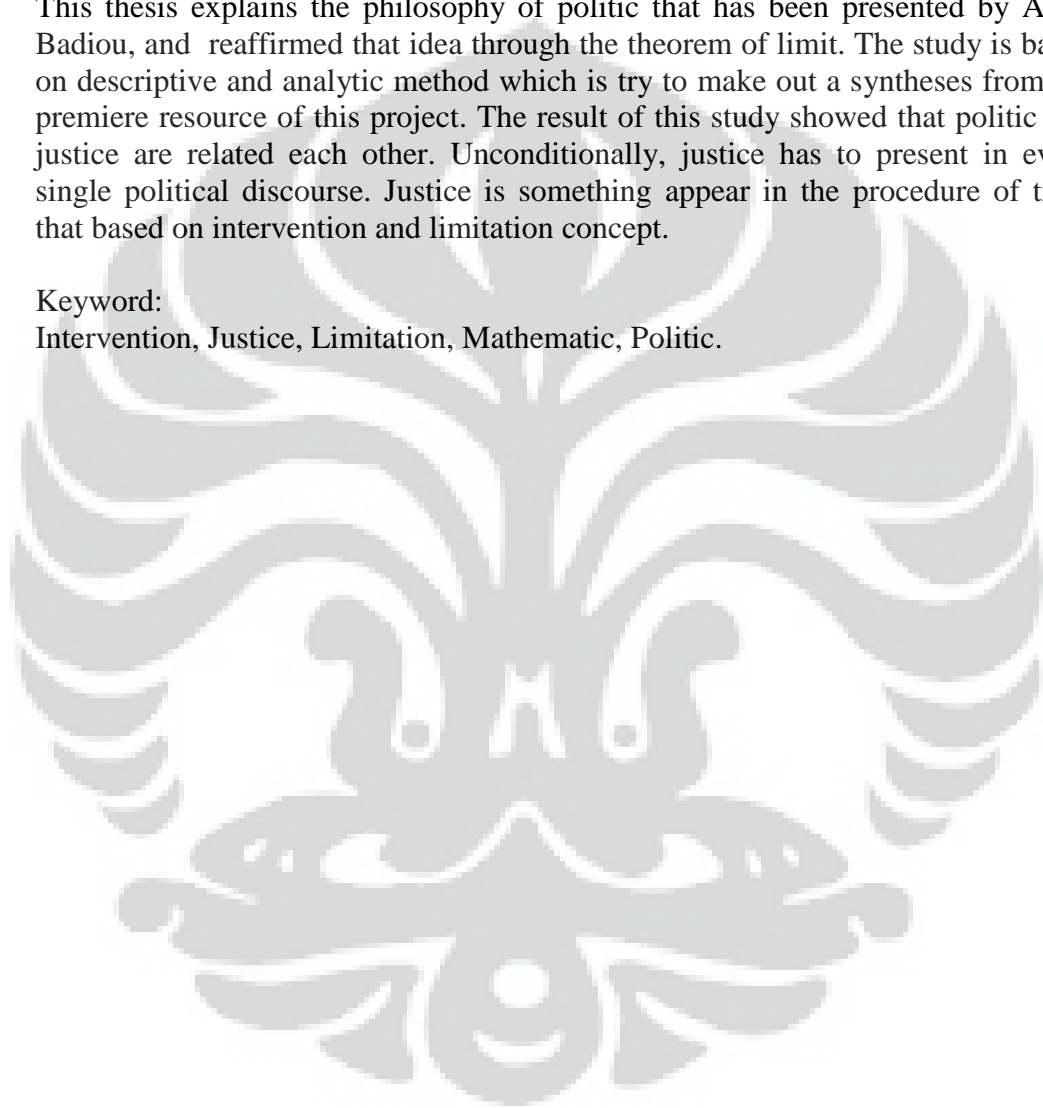
Kata Kunci:
Intervensi, Keadilan, Limitasi, Matematika, Politik,

ABSTRACT

Name : Irsyad
Study Program : Philosophy
Title : Intervention and Limitation : Reconsider Politic As a Thought

This thesis explains the philosophy of politic that has been presented by Alain Badiou, and reaffirmed that idea through the theorem of limit. The study is based on descriptive and analytic method which is try to make out a syntheses from the premiere resource of this project. The result of this study showed that politic and justice are related each other. Unconditionally, justice has to present in every single political discourse. Justice is something appear in the procedure of truth that based on intervention and limitation concept.

Keyword:
Intervention, Justice, Limitation, Mathematic, Politic.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Pernyataan Tesis.....	7
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Kerangka Teori.....	8
1.8 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 KAJIAN TEORITIS.....	13
2.1 Filsafat yang sistematis dalam kerangka filsafat <i>post-fondational</i> ...	13
2.2 Ontologi Filsafat Alain Badiou	16
2.3 Matematika Sebagai Ontologi	24
2.4 Ikhtisar	26
BAB 3 MATERIAL INTERVENSI.....	28
3.1 Teori Himpunan	28
3.2 <i>Evental Site</i>	36
3.3 <i>Forcing</i>	39
3.4 Intervensi Dalam Politik	45
BAB 4 KEADILAN DAN LIMITASI	57
4.1 Politik dan Keadilan	57
4.2 Dimensi Etis Dalam Politik.....	60
4.3 Relasi Limit dan Keadilan.....	63
4.4 Ikhtisar	70
BAB 5 PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Catatan Kritis dan Saran.....	75
GLOSARIUM.....	78
DAFTAR REFERENSI	82

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan filsafat pada ranah kontemporer ditandai dengan sebuah semangat untuk menghindarkan filsafat dari jebakan esensialisme yang sudah ditanamkan oleh Rene Descartes pada awal masa modern. Penghindaran tersebut tentunya bertujuan untuk membuat manusia sebagai subjek dalam filsafat itu sendiri mampu untuk menjernihkan pikirannya dalam menciptakan sebuah konsep yang nantinya berelasi dengan realitas kehidupan, hal yang menjadi tidak mungkin ketika filsafat sudah didahului dengan semangat fondasionalisme di setiap awal langkahnya.

Hal inilah yang kemudian dipertajam oleh Alain Badiou (2009) mengenai konsep *thinking the event*. Badiou menjelaskan :

“There is a first, false idea that needs to be set aside, which is that the philosopher can talk about everything. This idea is exemplified by the TV philosopher: he talks about society's problems, the problems of the present, and do on. Why is this idea false? Because the philosopher constructs his own problems, he is an inventor of problems, which is to say he is not someone who can be asked on television, night after night, what he thinks about what's going on. A genuine philosopher is someone who decides on his own account what the important problems are, someone who proposes new problems for everyone. Philosophy is first and foremost this: the invention of new problems” (p. 1).

Kritik tajam dari Badiou tersebut tentunya mewakili kegelisahan filsafat yang diserang baik secara internal maupun eksternal. Dengan artian, filsafat hendaknya hadir sebagai sesuatu yang militan, sebagai sesuatu yang mampu dibenturkan kepada situasi tertentu, bukan lagi filsafat yang mampu membicarakan banyak hal tapi tidak mampu menguasai satu hal atau satu masalah besar yang dihadapi. Sehingga bagi Badiou pembicaraan mengenai filsafat kontemporer ditarik pada tiga konsep yakni *to deal with choice, with distance and with the exception*.

Jika kita tarik kepada gagasan filsafat kontemporer yang menghindari suatu fondasionalisme, maka jelas pikiran Badiou mempertajam hal tersebut. Tugas filsafat sebagai sesuatu yang menemukan hal baru hanya akan dimungkinkan melalui absennya fondasi esensial dalam pikiran, dan yang tersisa hanyalah pengakuan atas infinitas yang selalu memproduksi dirinya.

Lantas bagaimana jalan pikiran tersebut memandang permasalahan politik?. Tentu sama hal dengan kerangka pikir diatas, dimana permasalahan politik harus kembali dievaluasi dengan melihat apa yang sudah diselesaikan oleh pemikir pada masa Modern. Problem pluralitas sebagai faktisitas ataupun infinitas memang sudah menjadi suatu masalah yang disadari oleh filsafat modern, namun problem tersebut diselesaikan dengan semacam kontrak yang tidak memungkinkan lagi adanya eksistensi individu sebagai subjek karena tidak ada ruang untuk hidupnya konsep *choice*, *distance*, dan *exception*.

Hal tersebut bisa diambil dari teori Thomas Hobbes mengenai teori kontrak-sosial, dimana ada usaha yang membawa keadaan masyarakat yang *chaos to order*. Hobbes menginginkan dan percaya bahwa konflik akan selesai dengan munculnya kestabilan dalam masyarakat. Teori ideal Hobbes mengenai kehidupan masyarakat ini tentunya dibantu oleh suatu instrumen untuk mewujudkannya, yakni apa yang ia sebut sebagai Leviathan. Dalam karyanya tersebut dilukiskan bahwa Negara seperti manusia raksasa yang terdiri atas banyak manusia-manusia kecil, artinya adalah, Hobbes mengandaikan sebuah kontrak sosial yang terjadi dalam masyarakat namun dengan satu syarat yakni negara harus bersifat abosolut agar terus bisa menjaga ketertiban melalui norma-norma yang diterapkan.

Namun justru dengan kontrak semacam itu, yakni Negara yang dijalankan melalui prosedural Leviathan menjadikan politik selesai dalam rezim tersebut. Politik menjadi bukan lagi politik yang mengandung pikiran untuk mengakui perubahan, infinitas, dan pluralitas, politik hanya sekedar instrumen manajemen tentang bagaimana Negara mengatur warga negaranya agar mencapai kestabilan. Alih-alih terciptanya sebuah keadilan, Politik justru bukanlah sebuah pikiran sebagai khas dari filsafat, dan lebih lanjut, politik yang dijalankan oleh negara (*state*) adalah sebuah politik yang hanya berjalan berdasarkan kepentingan semata

tanpa adanya indikasi implikasi bagi subjek politik untuk mengambil peran dalam sebuah keberagaman yang bersifat tak hingga.

Disisi lain, konsep infinitas dan perubahan adalah hal yang tidak dapat dilenyapkan dalam suatu masyarakat, dan justru dengan politik lah hal tersebut difasilitasi secara gamblang. Politik menjadi instrumen agar yang individual maupun yang singular bisa bertahan hingga mampu kembali memperoleh ruang untuk berjarak dengan rezim di luar dirinya dalam rangka memenuhi hak sebagai bagian dari suatu peradaban. Sehingga melalui pikiran tersebut skripsi ini mencoba mengangkat tema politik, sebagai pikiran untuk menyelamatkan singularitas ataupun yang kolektif dengan melihatnya dalam kerangka pikiran Alain Badiou serta konsep matematika yang bekerja sebagai analisa atas premis tersebut.

Dalam hal ini, penulis mencoba menekankan penjelasan matematika yang disung oleh Badiou sebagai basis ontologi filsafatnya. Pertama, kita tentunya sepakat bahwa ilmu deduktif ialah ilmu matematika, dalam hal ini dalil-dalil tidaklah dibuktikan melalui penyelidikan empirik, melainkan melalui penjabaran dalil-dalil yang sudah diperoleh sebelumnya. Begitu juga dengan teori matematika yang coba diterapkan dalam permasalahan ini, disamping teori himpunan yang dijelaskan oleh Badiou sebagai model atas pemikirannya, maka penulis juga menambahkan satu teori lain, yakni teori Limit dalam matematika. Adapun penambahan ini tentunya menjadi sebuah model lain dalam hal bagaimana membaca pikiran Badiou dengan mengembangkannya melalui sudut pandang yang berbeda.

Bagi penulis, pemikiran Badiou yang menjadikan matematika sebagai ontologi bukan semata membuat perbedaan dalam semangat filsafat kontemporer, namun juga hadirnya sebuah penjelasan filsafat politik yang justru bersandar pada teori matematika. Tentu, akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penulis khususnya dalam menempatkan jalan pikiran matematika khas Badiou di tengah tesis mengenai politik itu sendiri. Namun pada poin inilah, Badiou dengan bijak menantang filsafat untuk mempertimbangkan kembali politik sebagai wujud dari kehidupan bersama. Pertimbangan tersebut berada dalam kerangka evaluasi

bahasa matematika yang selalu memberi ruang tentang berbagai aksioma seperti apa yang hendak kita bangun dalam pandangan kita akan suatu hal.

Dalam permasalahan politik, penulis mencoba berangkat dari teori politik yang diusung pada filsafat modern. Dalam hal ini, awalnya penulis memahami bahwa teori limit dalam matematika sebenarnya mendukung, dan menjernihkan kembali konsep filsafat politik dari Thomas Hobbes. Pemimpin yang merepresentasikan negara semestinya dapat memahami bahwa aspek “politik” adalah kerangka limitasi yang dimiliki oleh seorang yang menjadi representasi negara tentang “yang baik” bagi masyarakat yang ia pimpin.

Namun tampaknya pemahaman tersebut menjadi sebuah kekeliruan yang fatal dalam melihat politik. Dengan artian, pembicaraan mengenai politik saat ini bukan lagi pada politik yang telah sempurna, ataupun politik yang selalu memadai setiap aktivitas dalam kehidupan bersama. Pemikiran mengenai politik yang memadai hanya akan berujung kepada praktek politik kepentingan semata, tidak akan ada sesuatu yang baru dalam masyarakat, yang ada hanya distribusi mengenai peran ataupun regulasi mengenai keberagaman yang selalu direpresentasikan oleh satu kesatuan yang disebut sebagai negara.

Hal inilah yang kemudian penulis coba kembangkan dalam kerangka filsafat Badiou. Melalui konsep intervensi sebagai hasil substraksi dari metode *forcing* dalam teori model matematika, Badiou dengan jelas mempromosikan sebuah gagasan mengenai *the real politic*. Bukan lagi politik yang sudah mapan, namun politik yang selalu membuka kemungkinan untuk terciptanya *new set* yang mampu menginterupsi corak konvensional yang selama ini berjalan.

Apa yang disebut Badiou sebagai *politic of truth* adalah gagasan yang membedakan politik sebagai pikiran dengan politik yang dipraktikkan oleh sebuah sistem yang bernama Negara. Diferensiasi tersebut adalah pembasahan mengenai ketidakmampuan negara dalam memberikan ruang bagi kemajemukan, sehingga politik adalah jalan bagi kesamaan pikiran dalam sebuah kolektifitas untuk menunjukkan diri melalui sebuah *event* dalalam rangkaian infinitas.

Begitu juga dengan konsep limit dalam matematika yang penulis jelaskan sebagai konsep yang mendukung intervensi dari Badiou. Sebagai pembahasan dasar dalam matematika, konsep limit banyak diadopsi dalam berbagai hal praktis

yang tentunya berada dalam koridor matematik itu sendiri. Namun satu hal mendasar yang menjadi alasan penulis menjadikan limit sebagai model pendukung dalam tesis mengenai politik adalah konsepsi dasar yang terkandung dalam limit itu sendiri. Limit dalam bahasa matematika tentunya bukan membatasi suatu hal untuk menjadikannya sebagai hasil yang final. Namun justru melalui limitlah, akan selalu ada kemungkinan untuk memproduksi turunan yang *real* dalam suatu fungsi. Limit adalah suatu metode yang menghindarkan suatu fungsi (dalam matematika) dari hasil *tidak tentu*.

Oleh karena itu, melalui latar belakang tersebut, pikiran mengenai intervensi dan limitasi yang direlasikan melalui pemodelan matematika diharapkan akan mampu menjadi semacam jalan pikiran yang mampu untuk mengembalikan politik sebagai pikiran, pikiran yang mampu memproduksi turunan yang *real* dalam infinitas dan pluralitas, sekaligus mampu memformulasikan kembali konten seperti apa yang hendak dihasilkan dalam setiap rumusan politik.

1.2 Batasan Masalah/Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan batasan permasalahan yang akan dikaji ataupun dieksplorasi lebih lanjut. Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan penting yang hendak dibahas. Pertama, mengenai teori himpunan sebagai basis ontologi yang diusung oleh Badiou. Hal ini menjadi penting dikarenakan ontologi adalah sponsor utama dalam setiap pembicaraan kita mengenai filsafat itu sendiri, termasuk dalam hal ini penulis akan menekan terlebih dahulu teori himpunan (*set theory*) adalah hal mendasar yang harus dipahami sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut dalam filsafat Badiou

Kedua, setelah mendapatkan pembahasan mengenai teori himpunan, maka permasalahan lain yang perlu dibahas adalah mengenai konsep intervensi sebagai *subtraksi* dari permasalahan yang terdapat dalam teori himpunan. Konsep intervensi menjadi relasi penting dikarenakan konsep ini sangat berkaitan dengan setiap penjelasan filsafat politik dari Badiou.

Ketiga, mengenai konsep limit yang hendak dikonversikan menjadi argumen penegas konsep intervensi dari Badiou. Dengan artian, limit adalah

permasalahan yang berkaitan dengan orientasi politik yang diangkat oleh Badiou, yakni permasalahan keadilan didalamnya. Melalui limit diharapkan ada sebuah relasi yang jelas antara pikiran Badiou mengenai kehadiran keadilan dalam setiap pikiran politik dengan fakta mengenai adanya infinitas dalam politik itu sendiri.

Melalui tiga permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa konsentrasi terhadap tiga konsep diatas adalah semacam variabel yang memungkinkan untuk menjelaskan tujuan utama penulisan skripsi ini. Variabel tersebut dipilih atas dasar adanya konstanta yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni mengenai “politik”. Sehingga, melalui batasan permasalahan ini akan didapat sebuah kerangka berpikir yang logis serta kongruen dalam menjelaskan tesis yang akan diangkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan secara lebih komprehensif, dan melalui rumusan masalah di bawah diharapkan langkah demi langkah penjelasan akan didapat secara lebih sistematis. Ada beberapa hal yang menjadi rumusan yang hendak diangkat, yakni :

- a. Bagaimana konsep ontologi yang diangkat oleh Badiou sebagai basis dalam bagian filsafat kontemporer ?
- b. Bagaimana menjelaskan konsep intervensi dalam kaitannya dengan tesis politik sebagai pikiran ?
- c. Bagaimana membangun sebuah jembatan antara politik dengan keadilan yang pada dasarnya berada dalam dimensi etika melalui konsep limit matematika ?
- d. Apakah terdapat relasi yang logis antara metode intervensi Badiou dengan konsep limit sebagai pendukung dimensi keadilan dalam filsafat politik Badiou ?

1.4 Tujuan Penulisan

- a. Membangun argumen yang berdasarkan filsafat politik Badiou dan merelasikannya dengan ilmu matematika untuk menarik kembali politik agar terhindar dari jebakan fondasionalisme.
- b. Menegaskan konsep keadilan sebagai bagian mutlak yang hadir dalam setiap pembicaraan mengenai politik.
- c. Mengkaitkan filsafat politik Badiou dengan konsep limit adalah sebuah upaya untuk menghadirkan filsafat yang mampu dibenturkan dalam sebuah pendekatan yang berbeda.
- d. Mempertanyakan kembali *politik* dalam konteks pembicaraan filsafat.

1.5 Pernyataan Tesis

Dalam bangunan skripsi ini, penulis hendak menyatakan sebuah pernyataan tesis bahwa konsep intervensi dan teorema limit adalah konsep yang berusaha untuk menegaskan keadilan sebagai prasyarat tindakan politik. Melalui limit, himpunan baru yang telah dihasilkan melalui prosedur kebenaran bukan hanya berhenti pada capaian tersebut, namun kebenaran tersebut juga harus terus diformulasikan dalam kerangka keadilan agar politik hadir secara efektif untuk memfasilitasi kehidupan bersama.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan penelitian tersebut.

Kajian pustaka sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif adalah konsep yang berperan penting dalam penelitian ini. Penulis mengambil apa yang telah dirumuskan oleh tokoh-tokoh melalui teorinya. Dalam hal ini, Alain Badiou melalui teorinya tentang konsep filsafat politik, dan teorema Limit yang terdapat dalam rumusan matematika adalah sumber rujukan utama dalam mengembangkan penelitian ini. Selain itu, disamping merujuk kepada teori-teori

dias, pemahaman akan situasi sosial kontemporer menjadi suatu hal yang penting, karena melalui pemahaman hal tersebut, akan didapat relevansi dari tujuan penelitian ini tentunya.

1.7 Kerangka Teori

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada suatu ciri khas yang menjadi kesamaan pemikiran politik kontemporer, yakni mengenai politik sebagai suatu pikiran yang memproduksi sebuah turunan yang *real*. Dengan artian, filsafat politik adalah urusan pikiran yang bertarung pada argumentasi konsep, bukan politik yang dibicarakan sebagai prosedural kerja, ataupun pembagian kekuasaan dalam suatu sistem sosial.

Pembicaraan tersebut tentunya juga berdampak pada pandangan yang berbeda pula, termasuk pikiran Badiou. Filsafat politik Badiou berbeda dengan pembicaraan Carl Schmitt mengenai relasi antagonisme, dan ia juga melepaskan politik dari belenggu politik yang berkuat dengan manajemen sosial yang diisi oleh beragam kepentingan, namun Badiou menegaskan bahwa politik adalah sebuah pikiran tunggal, sebuah ciri khas pikiran yang bebas dari apapun.

Sehingga, proyek filsafat Badiou adalah sebuah pikiran tentang bagaimana yang kolektif bisa membebaskan diri dari rezim di luar dirinya. Sebuah pemikiran tentang produksi kemungkinan-kemungkinan yang selalu ada dalam pembebasan tersebut.

Selanjutnya, yang menarik dari pemikiran Badiou adalah pengungkapan politik yang “sistematis”. Sistematis disini bukan berarti kembali mencari sebuah pondasi fundamental bagi politik, namun Badiou menjelaskan politik sebagai sistem yang terkandung dalam pikiran manusia, dan pikiran tersebut bagi Badiou adalah pikiran yang berkeinginan untuk mendefinisikan dirinya.

Pikiran ini terlihat dari *langkah* Badiou yang memulai dengan penjelasan mengenai ontologi. Bagi Badiou, ontologi adalah *dasar* yang memberikan kemungkinan bagi “yang kolektif” atau kemajemukan untuk menghasilkan kemajemukan *baru*. Sehingga, jika berbicara mengenai ontologi kita berbicara mengenai bagaimana kemajemukan dengan tidak meninggalkan yang singular.

Namun pada kenyataannya, strukturisasi yang majemuk malah terjebak pada adanya singularitas yang ditinggalkan. Untuk mengatasi hal itu, Badiou meletakkan pikirannya kepada sebuah pemodelan matematika, yakni mengenai Teori Himpunan. Disinilah perbedaan lain dari Badiou, matematika dijadikan sebagai sebuah model berpikir, sekaligus evaluasi untuk pikiran itu sendiri. Melalui teori himpunan kita mampu merumuskan kembali ontologi politik bagi Badiou.

Melalui teori himpunan, Badiou mengajak kita untuk memahami perbedaan antara keanggotaan dan kesatuan. Ini bisa dilihat dari contoh menggunakan teori himpunan tersebut.



a, b, c,

Himpunan x memiliki tiga elemen, yakni a , b , dan c . Namun jika ditarik lebih jauh, maka dalam himpunan itu sendiri, ada berbagai hal yang memiliki dampak berbeda terhadap kesatuan himpunan tersebut.

Diantaranya adalah setiap himpunan dalam suatu pembahasan teori himpunan akan selalu terdapat himpunan kosong (*null set*), terdapat aksioma-aksioma yang memberi syarat-syarat apakah suatu situasi dapat dinyatakan dalam notasi himpunan, dan keadaan dimana adanya infinitas dalam himpunan tersebut sebagai konsekuensi lebih lanjut dari fakta mengenai himpunan kosong dan aksioma-aksioma dalam teori himpunan.

Melalui hal diatas, Badiou menarik sebuah konsep lain, yakni apa yang disebut dengan situasi. Bagi Badiou, situasi bukanlah sekedar himpunan. Namun lebih dari itu, karena identifikasi mengenai adanya *subset* yang anggotanya tidak termasuk himpunan itu sendiri membuat situasi bukan hanya konsep yang mampu dianggap sebagai sebuah himpunan.

Paparan Badiou mengenai kemajemukan dalam suatu himpunan dan relasinya dengan situasi bertujuan untuk menjelaskan apa yang disebut dengan

Badiou sebagai peristiwa. Artinya, dalam peristiwa selalu mengandung *subset anomali* yang kemudian disebut sebagai *evental site* oleh Badiou.

Singkatnya, peristiwa memiliki rumusan bahwa ada *evental site* yang pada dasarnya menjadi elemen dari suatu himpunan namun tidak dapat diberlakukan konsep representasi layaknya elemen-elemen lainnya.

Pada tahap ini, kita bisa melihat adanya celah yang berusaha dijelaskan oleh Badiou terhadap konsep himpunan itu sendiri. Adanya gagasan mengenai celah tersebut tersebut bukan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, namun justru menegaskan bahwa melalui celah dalam teori himpunan kita dapat memaknai kembali himpunan itu sendiri. Artinya, hanya dengan melihat celah serta menjadikannya sebuah “dasar” dalam konsep himpunan itulah kita dapat memiliki kemungkinan untuk menghasilkan kemajemukan yang baru, sesuai dengan tujuan awal politik dalam pemikiran Badiou.

Melalui pemaparan diatas, Badiou sampai pada pemaparan mengenai kebenaran dalam politik. Kebenaran disini bukan dalam pemahaman mengenai epistemologi, bukan juga mengenai sesuatu yang melekat dalam proposisi. Namun kita hanya mampu mengenal kebenaran melalui instrumen lain, yakni pikiran untuk menghasilkan kebaruan.

Melalui hal diatas, penulis mencoba mendefinisikan lagi pikiran Badiou dalam kerangka matematika, yakni intervensi dan limitasi. Intervensi tak lain adalah semacam prosedur untuk menghasilkan kebenaran dalam politik bagi Badiou, melalui intervensilah kita mampu mendefinisikan peristiwa yang pada dasarnya telah *lenyap*. Artinya, intervensi adalah prosedur kebenaran yang menamai suatu peristiwa agar peristiwa itu hadir dan *efektif* dalam rangka memahami politik sebagai upaya suatu komunitas dalam memaknai ke-kita-an dalam kesetiaan yang mereka berikan.

Dalam pandangan saya, kembali merujuk pada konsep intervensi dalam matematika, maka teori tersebut seakan menegaskan bahwa penamaan tersebut justru bukan berasal dari anggota himpunan itu sendiri, namun datang dari kekosongan. Namun melalui kekosongan itulah kita bisa keluar atau mampu memproduksi kebaruan. Inilah yang kemudian disebut sebagai kesetiaan, artinya, ketika intervensi bekerja, maka subjek-subjek pada dasarnya menyandarkan

dirinya pada kekosongan, namun kebertahanan pada kekosongan atau ketidakpastian itulah yang memungkinkan tercapainya suatu kebaruan bagi yang kolektif.

Perlu juga ditegaskan bahwa konsep intervensi yang dijelaskan oleh Badiou bukan hadir begitu saja, namun juga melalui sebuah perjalanan konsep dalam konteks matematika. *Forcing* sebagai konsep yang diadopsi oleh Badiou adalah suatu metode yang diperkenalkan oleh Paul Cohen, seorang matematikawan pada tahun 1963 sebagai sebuah konsep yang mekonstruksi permasalahan rangkaian infinitas dalam teori himpunan. Secara sederhana, melalui metode tersebut didapat hasil bahwa terdapat ketidakmampuan dalam memutuskan seberapa jauh pemetaan kita terhadap suatu rangkaian himpunan, namun kita hanya dapat “memaksa” suatu keterputusan rangkaian dengan menegaskan adanya rangkaian baru sebagai hasil dari penarikan berdasar aksioma-aksioma yang mendukung suatu notasi himpunan.

Lantas bagaimana dengan konsep limit?. Bagi penulis, limit disini menjadi sebuah kesimpulan sementara terhadap pembacaan penulis mengenai Badiou. Artinya, setelah adanya intervensi untuk melabeli suatu peristiwa, maka limitasi bekerja sebagai sesuatu yang bertugas untuk mendapatkan turunan *real* dari hasil intervensi sebelumnya.

Memang pada dasarnya Badiou menyandarkan teorinya kepada formalisme matematika. Namun, disisi lain, limit yang pada dasarnya berupaya untuk menghindari turunan tak tentu ($\frac{0}{0}$), juga bisa direlasikan dengan pikiran Badiou yang menyelipkan *cita-cita* politik yang bukan sekedar pada tahap formalisme, namun juga mengisi bentuk tersebut dengan nilai-nilai seperti keadilan dan kesetaraan.

Mungkin, keinginan tersebut adalah semacam hasil dari kerja prosedur kebenaran dimana pikiran dan tindakan adalah sesuatu yang harus selalu selaras, sehingga, dengan jalan pikiran seperti itulah, politik selalu mampu menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi “yang kolektif” untuk keluar dari rezim di luar dirinya.

Sehingga dalam poin ini bisa disimpulkan bahwa adapun kerangka teori yang digunakan secara mendasar adalah :

- **Permasalahan matematika sebagai ontologi oleh Alain Badiou**
- **Pemodelan Teori Himpunan**
- **Intervensi melalui metode *Forcing***
- **Konsep Limit dalam Matematika yang menjembatani pikiran mengenai keadilan dengan upaya menghasilkan himpunan baru melalui intervensi.**

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini dibangun atas lima bagian utama. Pada bab 1 sebagai bab pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pernyataan tesis, metode penelitian, dan kerangka teori umum dari penelitian ini. Pada bab 2, penulis akan menjelaskan kerangka ontologi sebagai landasan teori filsafat politik yang diangkat oleh Badiou. Pada bab 3, dijelaskan mengenai genealogi konsep intervensi dari Badiou yang tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai teori himpunan dan konsep *Forcing*. Pada bab 4, akan dijelaskan mengenai relevansi dari landasan teori yang diusung oleh Badiou, terutama konsep filsafat politik dengan teorema Limit dalam kerangka penegasan konsep keadilan dalam pikiran politik, dan pada bab 5, terdapat kesimpulan dari penelitian ini, beserta saran dari penulis terkait permasalahan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi bagian penutup dari pembahasan skripsi ini.

BAB 2 **KAJIAN TEORITIS**

Sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih mendalam mengenai koherensi antara konsep intervensi dengan konsep *Forcing* dalam teori model matematika, maka ada baiknya untuk menelusuri geneologi filsafat Badiou itu sendiri, khususnya ciri khas pemikiran politiknya. Sebagai bagian dari semangat *post-foundational*, Alan Badiou muncul dengan berbagai pandangan yang membuatnya berada dalam semangat *post-foundational* sekaligus memiliki tempat tersendiri didalam sistem tersebut.

2.1 Filsafat yang “sistematis” dalam kerangka *Post-foundationalis*

Alan Badiou memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat filsafat khususnya dalam hal apakah filsafat itu mempunyai sistematika atau tidak. Tentu dalam pembicaraan mengenai filsafat kontemporer, kata “sistem” menjadi sebuah konsep yang dihindari dalam berbagai diskursus filsafat. Penghindaran tersebut tak lain bertujuan untuk menjadikan filsafat tak lagi terjebak dalam kerangka fondasionalisme yang menjadi kritik utama postmodernisme. Sehingga dengan dasar itulah, kata sistematika adalah kata sifat yang tidak seharusnya melekat dalam pembicaraan filsafat saat ini.

Namun Badiou mengambil sebuah posisi yang berbeda dalam hal ini. Baginya, filsafat adalah sesuatu yang sistematis, tetapi bukan sistematis dalam pengertian yang selama ini dipahami dalam semangat filsafat modern.

Hal ini ditegaskan oleh Badiou dengan pernyataan bahwa :

“if by “system” you mean , first that philosophy is conceived as an argumentative discipline with a requirement of coherence, and second that philosophy never takes the form of singular body of knowledge but, to use my own vocabulary, exists conditionally with respect to a complex set of truths, then it is the very essence of philosophy to be systematic”.(Badiou, 1994, p.84)

Pernyataan Badiou tersebut bukan hanya berarti sebagai pertanggungjawaban atas konsep sistematika atas filsafatnya, namun juga membantu kita dalam melihat relasi antara konsep sistem dengan konsep *Post-*

Foundational yang selama ini menjadi kabur karena adanya kegamangan dalam memahami konsep sistem itu sendiri. Dengan artian, jika kita membicarakan filsafat, bukan berarti menghindari sistem tanpa penjelasan yang rasional, namun sebaliknya, akan lebih bijak jika membenturkannya dengan sistem yang ada tanpa harus terjerumus kedalam sistem itu sendiri.

Tentunya ada berbagai sudut pandang dalam menjelaskan hal diatas. Pertama, dapat dilihat dari perjalanan pemikiran Alan Badiou sendiri. Di sebagian besar buku-buku yang mencoba menginterpretasikan pemikiran Badiou, selalu terdapat penjelasan mengenai sosok Badiou yang merupakan sosok yang *jarang* (*rare example*) mengenai corak pemikiran seorang filsuf kontemporer asal Perancis.

Seperti Oliver Marchart (2007) yang menuliskan frase "*rare example*" di awal pembahasannya mengenai pemikiran politik Badiou dalam konteks relasinya dengan teorisasi filsafat kontemporer. Serta Oliver Feltham dan dan Justins Clemens (2004) yang menuliskan pemikiran Badiou memiliki corak yang berbeda dengan kategori filsuf kontemporer Perancis di pengantar karya Badiou yang berjudul *Infinite Thought*.

Semua pandangan tersebut didasari pada temuan mengenai tradisi *left-Heidegerian* yang kental dalam pemikiran Badiou, sementara dalam sistem *post-foundational*, khususnya dalam tradisi Perancis, ada semacam pikiran yang berusaha untuk menolak pengaruh dari Heideger dalam rangka menegaskan filsafat memang sudah tidak dapat lagi didasari pada suatu fondasi tertentu.

Hal ini ditegaskan oleh Jacques Derrida dengan menuliskan :

"for quarter century, Heidegger was never named in any book of those who, in France, were forced to recognize in private or in public much later he had played a mayor role in their thought (Althusser, Foucault, Deleuze, for example)". (Derrida, 1993, p.190)

Tidak dapat disangkal pengaruh Heidegger memang kental dalam perjalanan pemikiran Badiou. Contoh jelas mengenai hal tersebut adalah karya Badiou berjudul *Being and Event* yang merupakan sebuah interpretasi lebih lanjut dari Badiou atas pemikiran Jean Paul Sartre melalui karya berjudul *Being and Nothingness*. Disisi lain *Being and Nothingness* dari Sartre juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh karya Heidegger berjudul *Being and Time*.

Sehingga menjadi jelas bahwa pengaruh Heidegger memang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafat Badiou. Justru sebaliknya akan menjadi tidak rasional jika filsuf kontemporer, khususnya Filsuf Perancis yang mengambil Sartre sebagai referensi, menyangkal adanya corak Heidegger didalam pikirannya.

Namun pertanyaan yang tentunya harus segera dijernihkan adalah, dalam hal apakah kita masih dapat mengkategorisasikan Alain Badiou sebagai filsuf *post-fondational* yang memang menolak adanya *sistem* sebagai sebuah fondasi utama dalam berfilsafat?.

Di awal penjelasan, penulis telah mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai hal ini, dengan menyatakan bahwa filsafat yang ditarik Badiou bukanlah pikiran yang berdiam dalam sebuah sistem (dalam arti yang dipahami dalam *common measure* tradisi filsafat modern). Namun pikiran yang mampu membenturkannya dengan sistem itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari pengenalan Badiou tentang ontologi, dimana ide tentang *event* yang sebelumnya menjadi *fundamental ontology* dalam pemikiran Heidegger digantikan oleh *mathematical set theory* oleh Badiou.

Apa yang dilakukan oleh Badiou bukan lagi berdiam dalam sistem yang dalam kemunculan semangat kontemporer selalu dihindari agar tidak terjerumus lagi kedalam fondasionalisme, namun kemampuan untuk mengambil kesempatan untuk berhadapan dengan sistem, mengambil jarak, hingga akhirnya melakukan sebuah perbedaan terhadap sistem yang telah stabil tersebut, itulah yang dimaksud Badiou sebagai sebuah filsafat yang sistematis.

Untuk lebih menjernihkan persoalan ini, Badiou sendiri dengan jelas menegaskan hal tersebut dalam sebuah buku yang ia tulis bersama Slavoj Zizek berjudul, *Philosophy In Present*. Melalui sebuah penalaran yang sangat cerdas, ia menyimpulkan tugas filsafat saat ini, yakni :

“These are the great tasks of philosophy : to deal with choice, with distance, and with the exception –at least if philosophy is to count for something in life, to be something other than academic discipline”. (Badiou, 2009, p.9)

Tiga fungsi diatas dapat direlasikan dengan bagaimana seorang Badiou menjawab keambiguan sebagian orang dalam memahami filsafat itu sendiri,

khususnya aliran filsafat yang diusung Badiou. Dengan artian, masih dalam persoalan sistem, kita hendaknya tidak lagi menghindarinya dalam diskursus filsafat, namun yang perlu dilakukan adalah mengambil sebuah keberanian untuk berhadapan dengan kestabilan sistem hingga pada akhirnya membuat sebuah perbedaan sebagai hasil atas *deal with choice*, *distance* dan, *exception* itu sendiri. Hal itulah yang dilakukan oleh Badiou dalam melihat persoalan corak Heidegger dalam filsafatnya. Ia memang mengakui hal tersebut sebagai sebuah sistem yang mempunyai potensi untuk membuatnya terjebak dalam fondasionalisme, namun dengan *choice*, *distance*, dan *exception*, Badiou memberikan sebuah penjelasan yang sangat rasional mengapa pikirannya saat ini menjadi semakin populer dalam tradisi *post-fundational* dengan konsep “sistematik” di dalamnya.

2.2 Ontologi Filsafat Alain Badiou

Dalam diskursus mendasar mengenai filsafat postmodernisme, ada berbagai konsep yang seringkali muncul sebagai bentuk kesamaan corak berpikir para filsuf kontemporer. Diantaranya adalah adanya konsep *The return* yang dapat dilihat dari pikiran Badiou melalui karyanya yang berjudul *Infinte Thought : truth and the return of philosophy*, Chantal Mouffe melalui karyanya yang berjudul *The return of political*, ataupun konsep *Retreat* yang muncul dalam pikiran Jean-Luc Nancy dan juga Alain Badiou.

Tentunya melalui kemunculan konsep tersebut, kita dapat menganalisisnya dari berbagai sudut pandang, mengapa konsep-konsep tersebut begitu penting dalam diskursus filsafat para filsuf kontemporer. Penulis mengambil dua konsep diatas sebagai contoh yang tidak lain bertujuan untuk menjelaskan adanya relasinya dengan konsep mendasar lainnya, yakni ontologi dari pemikiran Badiou dalam politik secara khusus.

Pertama, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kata *the return* dan *retreat*. Secara literal tentu dapat dilihat adanya hubungan antara kedua kata tersebut, makna yang berlawanan antara kedua kata tersebut menjadi kunci awal dalam menemukan penjelasan rasional mengapa kata-kata tersebut seringkali menjadi sponsor atas pikiran filsuf kontemporer.

Untuk memudahkan pencarian makna tersebut, kita dapat melihat dari makna kata *retreat* terlebih dahulu. *The retreat of political* adalah konsep yang dijelaskan oleh Jean-Luc Nancy yang berarti adanya semacam *sedimentasi* dalam pembicaraan mengenai politik. Kata *retreat* memang tidak dapat diartikan sebagai kemunduran politik secara literal, namun dalam paparannya, Nancy pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa politik tidak lagi mengusung sebuah politik sebagai pikiran, akibatnya setiap perjumpaan kita akan kata politik yang tersisa hanyalah sebuah permukaan yang menunjukkan setiap hal telah dilekatkan dengan politik. Politik pada kenyataannya menjadi lenyap karena semuanya sudah berbaur dalam percakapan mengenai sebuah kepentingan semata.

Setiap kegiatan yang ada dalam kehidupan keseharian selalu dilekatkan dengan kata politik itu sendiri, sehingga ketika semuanya telah menjadi politik, kita tidak mampu lagi mengenali lagi kemurnian politik itu sendiri. Konsep *retreat* tersebut dapat dilihat dari pemahaman kita tentang politik hanya pada sebatas politik praktis, absennya pikiran *friend-enemy* didalam praktek politik, dan pada akhirnya politik “memang” hanya sebatas konsep yang berjalan dalam urusan administrasi belaka.

Dengan dasar itulah Nancy menawarkan konsep yang berusaha untuk melawan endapan tersebut. Penjelasan mengenai solusi yang ditawarkan Nancy tentunya tidak akan dijelaskan secara detil, namun dalam konteks ini solusi yang ditawarkan oleh Nancy dapat kita ringkas menjadi sebuah proyek tentang sebuah usaha untuk mengembalikan politik pada tempatnya. Pada poin ini, menjadi jelas bahwa Nancy sebagai bagian dari filsuf politik kontemporer melihat kenyataan *retreat* sebagai fakta yang harus dilawan, dan hanya dengan kata *the return* akan ada kemungkinan untuk melawan kemunduran tersebut yang tentunya dapat dilihat dari berbagai pikiran yang ditawarkan.

Kedua, kita juga dapat melihat bagaimana konsep *the return* bekerja dalam pikiran para filsuf kontemporer, termasuk Badiou. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Nancy, kali ini kata *return* memang menjadi bahan perkenalan akan pentingnya memikirkan apa arti dari filsafat itu kembali. *Return* bukan hanya berarti kembalinya sesuatu, namun lebih dari itu, kata ini menunjukkan sebuah lompatan akan kembalinya tentang apa yang seharusnya dipikirkan, dibicarakan,

hingga dilakukan, khususnya dalam konteks frase *the return of philosophy*, ataupun *the return of political*. Dalam sisi yang ekstrem, kita juga dapat mengatakan bahwa konsep *return* mutlak digunakan karena terdapat kesalahan fatal dalam memahami filsafat sehingga tidak ada jalan lain untuk sejenak menanyakan kembali pertanyaan mendasar seperti, *what is philosophy?*.

Tentu akan selalu ada perdebatan mengenai interpretasi atas konsep diatas, namun bagi penulis, apa yang terdapat dalam pikiran seorang Badiou, Mouffe, Nancy, ataupun berbagai filsuf kontemporer lainnya adalah pikiran yang sepantasnya hadir atas apa yang terjadi dalam dunia filsafat itu sendiri. Upaya untuk melawan fakta tentang kemunduran berbagai diskursus tersebut mutlak hadir dalam konteks post-modernisme. Filsafat tentunya bukan lagi sebuah hal yang bisa dibicarakan dalam berbagai hal dalam kehidupan keseharian manusia, begitu juga dengan turunannya yang tidak dilekatkan begitu saja pada semua hal yang akan dibicarakan, dan satu lagi hal yang penting berkaitan dengan konsep *the return* tersebut adalah relasinya dengan penjelasan mengenai ontologi, khususnya dalam pemikiran Badiou.

Sebelum masuk kepada penjelasan mengenai konsep ontologi dari Badiou, penulis perlu kembali menegaskan apa yang dimaksud dengan “kembalinya” filsafat. Tidak semua hal yang terjadi di dunia ini dapat dibicarakan dalam filsafat, karena tidak semua hal tersebut mengandung hal yang disebut Badiou sebagai *Philosophical situation*. Definisi mengenai situasi filsafat ini tentunya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yakni mengenai kemampuan untuk mengambil pilihan, mengambil jarak, hingga membuat sebuah perbedaan agar hidup tidak lagi berjalan dalam kontingensi konservatis.

Sehingga dengan meletakkan pikiran tersebut kepada situasi filsafat, kita mampu mengembalikan filsafat kepada diskursus yang riil. Seperti yang diungkapkan Isaiah Berlin dalam menjelaskan dua tipe pemikir, yakni : “*The Fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing*”. Terdapat pemikir yang mengetahui banyak hal, namun selalu ambigu dalam menyusun kerangka berpikirnya tentang suatu hal hingga cenderung menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif, dan ada pemikir yang mengetahui satu hal besar sebagai sebuah hasil atas kemampuannya untuk memfokuskan pemikirannya dengan menghubungkan

berbagai hal kepada satu visi yang jelas. Bagi penulis, pada poin ini, apa yang diutarakan Badiou membawanya menjadi seorang *hedgehog* dalam kancah dunia filsafat saat ini.

Sekarang kita masuk kepada relasi konsep *the return* dengan konsep yang lebih penting, yakni relasinya dengan ontologi filsafat dari Alain Badiou. Hal pertama yang menjadi penting untuk dibahas dalam kerangka ontologi tersebut adalah konsep keberagaman (*multiplicity*) yang menjadi dasar ontologi bagi Badiou. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, filsafat Badiou memilih untuk mengkombinasikan apa yang dikonsepsikan oleh Heidegger mengenai *Ontological Difference* dan konsep *situation* dari pemikiran Wittgenstein. Hasil dari pilihan tersebut adalah semacam modifikasi Badiou atas konsep Heidegger yang membedakan antara *Being dan being*, sementara bagi Badiou perbedaan tersebut menjadi ambigu dikarenakan *being* yang dibedakan oleh Heidegger tidak dapat dipisahkan secara jelas dengan konsep seperti objek, entitas, ataupun eksistensi. Sehingga menurut Badiou, konsep yang paling memiliki kemungkinan untuk direlasikan dengan *Being* itu kembali tak lain apa yang disebut sebagai *situation* oleh Badiou, karena hanya melalui situasilah terdapat representasi mengenai *multiplicity*.

Konsep yang dibangun oleh Badiou melalui ontologinya tersebut tidak lain adalah pikiran yang mencoba terbuka atas apa yang sebenarnya dihadapi dalam realitas kehidupan manusia itu sendiri. Pengakuan akan adanya situasi yang beragam adalah wujud dari pikiran Badiou yang tidak hanya menjadikan situasi sebagai pengganti dari konsep substansi ataupun relasi, namun justru situasi adalah konsep yang mampu mewartakan substansi, relasi hingga modalitas sekalipun.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mengenai konsep situasi tersebut, yakni :

The term situation, is prior to any distinction between substance and/or relation and so cover both....The Concept of situation also designed to accommodate anything which is regardless of its modality; that is regardless of whether it is necessary, contingent, possible, actual, potential, or virtual... (Badiou, 2004, p.10)

Lebih lanjut, konsep *multiplicity* yang diusung Badiou sebagai basis ontologinya tentunya berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Aristoteles mengenai konsep substansinya. Perbedaan tersebut terletak pada pikiran mengenai substansi yang berujung kepada suatu konsep yang lebih besar lainnya, yakni *cosmos*. Sedangkan bagi Badiou, *unity* dari situasi adalah sebuah hal yang disangkal secara mutlak. Tidak ada basis yang mampu menyatukan situasi tersebut, karena bagaimanapun situasi selalu bersifat kontingen dan disisi yang sama ide mengenai situasi adalah ide yang membedakan ontologi Badiou dengan ontologi klasik yang masih mengusung ide totalitas didalamnya.

Hal lain yang perlu digaris bawahi dalam memahami basis ontologi Badiou adalah munculnya konsep yang disebut Badiou sebagai *Count for one*. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai masih adanya sesuatu yang disebut dengan kesatuan (*oneness*) itu sendiri. Pikiran ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Lacan yang memang menyatakan bagaimanapun juga kita berusaha menyangkal adanya “*One*” yang menyatukan tersebut, namun bagi Badiou hal tersebut dapat dilihat dalam kerangka yang matematis. Badiou memang tidak menyangkal adanya *oneness* tersebut, namun baginya adanya *oneness* atau tidak hanya bagian dari proses dimana kita melekatkan yang disebut *count for one* atau tidak dalam setiap situasi yang kita hadapi. Selain itu operasi dari *count for one* juga merupakan operasi yang tidak dicampuri oleh agen seperti yang ada dalam pikiran ontologi klasik, namun berada dalam situasi itu sendiri.

Secara sederhana, *count for one* menghasilkan perbedaan dalam keberagaman tersebut, sekaligus semakin membedakan ontologi yang dibicarakan oleh Badiou dengan apa yang sebelumnya diungkapkan oleh Heidegger.

“Unlike Heidegger, however, the being of a situation is not something that only a poetic saying can approach: it is, quite simply and banally, the situation ‘before’ or rather, without the effect of the count for one; it is the situation as a non-unified or inconsistent multiplicity. ‘after’ or with the effect of the count for one; a situation is a unified or consistent multiplicity”. (Badiou, 2004, p.12)

Untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami konsep *count for one* tersebut, ada banyak ilustrasi yang terdapat dalam dapat mewakili konsep tersebut. Contoh yang sederhana adalah ketika kita membicarakan sebuah

kelompok dengan beragam anggota didalamnya. Sebut saja itu klub sepakbola, organisasi masyarakat, dan berbagai hal lainnya yang menggambarkan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen berbeda.

Namun yang paling penting dari penjelasan konsep ini bagi pemahaman kita terhadap Badiou adalah kritik terhadap *the state* yang menjadi gambaran nyata dari prosedur *count as one*. Perlu ditekankan bahwa penjelasan Badiou mengenai pikiran politik tidak lain adalah pikiran yang menunjukkan sebuah diferensiasi yang gamblang antara *politic of state* dengan *politic of truth*. Identifikasi awal mengenai konsep *count as one* menjadi penting karena konsep tersebut menjadi salah satu faktor kunci untuk mengkritik konsep *the state*. Dalam konteks politik, menjadi jelas bahwa Badiou membangun sebuah proposisi antagonis terhadap “politik” yang selama ini dijalankan oleh negara melalui metode *count as one*.

Dengan artian, setelah dilekatkan dengan konsep *count for one*, tentu organisasi tersebut adalah sebuah kesatuan yang tidak lagi menghiraukan elemen-elemen berbeda didalamnya, walaupun ada perbedaan yang mencolok satu sama lain dalam setiap elemen tersebut, namun pada akhirnya ia tetap dihitung sebagai satu kesatuan *count for one*.

Namun disisi lain jika konsep *count for one* tidak bekerja didalamnya maka yang dapat dilihat adalah *inconsistent multiplicity* pada sesuatu yang tadinya dilihat sebagai “kesatuan”. Adanya inkonsistensi tersebut dilihat dari penghirauan terhadap elemen-elemen yang berbeda yang menyusun suatu “kesatuan”. Dalam hal ini akan terlihat sebuah inherensi antara elemen dengan apa yang pada akhirnya diucapkan sebagai kesatuan. Memang “kesatuan” memiliki sebuah kekuatan yang berusaha menyatukan perbedaan tersebut, namun disisi lain adanya keberagaman elemen dalam suatu ‘kesatuan’ semakin menegaskan apa yang dimaksud oleh Badiou, *multyplicity* sebagai identitas yang pasti hadir dalam setiap perjumpaan kita dengan situasi.

Konsep tersebut juga terlihat jelas dalam penjelasan Badiou mengenai apa yang disebut sebagai *Real Politic*. Badiou memulai penjelasannya dengan mengambil contoh kondisi parlemen di sebagian besar Negara saat ini. Dalam pandangan Badiou, parlemen “diatur” oleh tiga hal mendasar, yakni kapitalisme,

undang-undang, dan demokrasi. Tiga hal tersebut menjadi sangat stabil dalam membangun kehidupan politik namun sekaligus menutup pikiran akan *political*. Tiga hal tersebut tak lain adalah *sub-set* yang berada dalam satu situasi yang menghasilkan topeng akan semangat pluralisme. Hal ini diwakili dengan sebuah pernyataan, yakni : “*We are, politically, under the regime of the One, and not under that of multiple*”.

Dengan pandangan itulah, Badiou memperkenalkan konsep *real politic* sebagai bagian kritik atas *the one* yang menjadi motor yang menjalankan kontingensi dari konservatisme. *Real politic* menjadi pikiran yang mencoba meinginterupsi kestabilan tersebut, agar membuka kemungkinan untuk menghadirkan kembali pluralisme yang sebelumnya telah ditutup dengan topeng kapitalisme, demokrasi, dan undang-undang yang menjalankan sebuah Negara.

Pandangan Badiou diatas tidak lain adalah penegasan kembali apa yang telah dipikirkan oleh Heidegger sebelumnya, yakni melawan objektifikasi dari politik. Apa yang kita lihat sekarang dalam politik yang keseharian adalah semacam objektifikasi yang mereduksi faktisitas tentang adanya keberagaman yang terdapat dalam kehidupan manusia. Objektifikasi tersebut tidak hanya melahirkan pikiran yang normatif, namun juga sebuah keberlangsungan *common measure* di segala lini kehidupan masyarakat. Proyek Badiou tentunya bukan sekedar menegaskan kembali pikiran Heidegger, namun sekaligus mengtransformasikan gagasan tersebut ke dalam kosakata dari Lacanian, yakni mengenai konsep *the real* itu sendiri.

Jika kita tarik konsep *the real* dari Lacan, tentu kita akan bertemu dengan pikiran mengenai gagasan *the real* yang bekerja pada dimensi waktu yang akan datang (*future anterieur*). Dengan artian, konsep *the real* bekerja bukan sebagai hal yang merepresentasikan subjek politik, namun bekerja untuk terus membuka kemungkinan-kemungkinan dengan mengganggu stabilitas dari situasi kesatuan.

Singkatnya, proyek dari konsep *the real* adalah proyek tentang *possibility of impossibility*. Selalu ada kemungkinan di tengah stabilitas konsep yang membangun politik yang seakan-akan tidak dapat diganggu gugat lagi kesatuannya tersebut. Inilah yang menjadi turunan dari sebuah pilihan untuk membenturkannya dengan “sistem” yang selama ini memang menjadi kritik

utama dari gelombang postmodernisme. Namun disisi lain jika memang ada pikiran yang masih mempertanyakan pikiran Badiou sebagai sebuah “sistem”, maka konsep *Possibility of impossibility* adalah jawaban dari Badiou, khususnya dalam hal politik.

Selanjutnya, kita masuk kepada konsep kunci lainnya dari Badiou, yakni apa yang disebut sebagai peristiwa (*event*). Untuk memudahkan kerangka penjelasan mengenai konsep ini, kita dapat menariknya sebagai konsekuensi dari beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat dikatakan, bahwa *event* adalah semacam hasil “akhir” dari usaha yang berupaya untuk menginterupsi sistem yang tengah berjalan. Sehingga politik ataupun semua konsep yang berkaitan dengan yang real dalam sudut pandang Badiou, bergantung pada *event*, bukan bersandar pada undang-undang ataupun sistem sosial yang mendoktrin masyarakat ataupun sebuah *society*.

Namun definisi dari *event* itu sendiri juga tidak dapat dijabarkan, sama halnya ketika Badiou juga menolak untuk mendefinisikan apa arti dari filsafat itu “kembali”. Hal ini dijelaskan dengan pernyataan mengenai *event* yakni : “*event as lecercle has it, flash like bolts of lightning, and truth emerge*”. *Event* adalah sesuatu yang tidak diprediksi kedatangannya, ataupun dihitung dengan metode apapun. Sehingga bagaimanapun juga, *event* tentunya bukanlah bagian dari situasi yang tengah diinterupsi tersebut, ia datang dari luar sebagai hasil “akhir” dalam proyek interupsi tersebut. Sehingga kita juga hanya mampu mengenali *event* dengan proses intervensi agar ia hadir secara efektif dalam situasi yang telah digantikan oleh *event* itu sendiri.

Oleh karena itu, *event* adalah sesuatu yang memungkinkan kontingensi itu terus berlanjut, ketika ia terjadi maka sekaligus ia juga akan memudar seketika dan digantikan oleh usaha selanjutnya dari bentuk interupsi lainnya. Kata hasil “akhir” bukanlah sesuatu yang mengindikasikan pencapaian final yang tidak membutuhkan kemungkinan lainnya, namun hanya sebuah usaha dari fragmen sebuah konsep *real* yang telah berjalan.

Tentu hal hasil “akhir” yang disebutkan diatas berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai situasi yang bersifat tak hingga itu sendiri. Di suatu sisi tidak akan ada hasil akhir dalam proses fakta mengenai ketakberhinggaan

itu sendiri, namun ketika kita mengintervensi *event* melalui penamaan, maka dalam hal itu kita sejenak melimitasi apa yang telah dihadapi dan dicapai dalam kerangka *real*. Limitasi tersebut dilakukan tidak lain adalah upaya agar usaha tersebut hadir secara efektif dalam situasi, sekaligus membuka kemungkinan lain tentang situasi lain yang hendak diinterupsi.

Kembali lagi kepada persoalan dalam onotologi Badiou mengenai *multiplicity*. Tentu yang menjadi permasalahan berikutnya adalah pertanyaan mendasar yakni jika memang kita tidak melekatkan konsep *count for one* untuk melihat adanya *inconsistency*, maka juga akan selalu ada kemungkinan untuk hanya melihat *inconsistency*, tidak lebih dari hal tersebut. Hal inilah yang kemudian membawa kita kepada konsep selanjutnya yang sangat kental dengan matematika khususnya dalam hal teori himpunan. Dengan logika tersebut, Badiou menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang berkaitan dengan konsep limit, konsep *real*, dengan kerangka teori himpunan dalam matematika.

2.3 Matematika Sebagai Ontologi

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran awal mengenai apa yang dimaksud matematika sebagai ontologi oleh Badiou. Tentu konsep ini bukan muncul begitu saja dalam kerangka filsafat Badiou dengan mengambil teori himpunan sebagai basis penjelasan yang sangat mendasar. Namun munculnya sebuah kesimpulan awal mengenai matematika adalah ontologi tidak dapat dilepaskan dari teori model yang mampu menggambarkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Badiou mengenai temuannya terhadap *inconsistency multiplicity*.

Melalui *Being and Event* Badiou pada dasarnya menjelaskan dua hal penting yang berkaitan dengan keseluruhan proyek filsafatnya. Pertama adalah tesisnya mengenai matematika sebagai ontologi. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa dengan matematika (teori himpunan), konsep *multiplicity* tersebut bisa dipetakan dengan jelas. Sehingga, pemetaan yang jelas tersebut membuat kemungkinan untuk menjawab pertanyaan mengenai ekistensi yang real mengenai *inconsistency multiplicity*. Hal kedua yang menjadi penjelasan utama dalam *Being and Event* adalah penundaan terhadap konsep *truth* jika dipandang dari sisi situasi

yang konsisten. Kebenaran tidak dapat diputuskan begitu saja karena bagi Badiou, diperlukan semacam persiapan bagi terciptanya sebuah interupsi ditengah berjalannya fondasionalisme dalam kehidupan keseharian itu sendiri. (Gillespie, 2008).

Tentu dalam bab ini penulis tidak akan menjelaskan secara mendetil tentang apa yang dimaksud dengan teori himpunan yang menjadi pendekatan akan ontologi Badiou. Namun hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu tentunya adalah apakah latar belakang Badiou untuk menarik teori himpunan sebagai penopang atas tesis matematika sebagai ontologi.

Proyek Badiou menjelaskan tesis matematika sebagai ontologi adalah semacam evaluasi lebih lanjut atas ontologi klasik. Dengan artian, Badiou mereformulasi konsep seperti *being*, relasi, dan kualitas ke dalam term matematika, lebih khususnya dalam kerangka teori himpunan. Dalam sisi yang sama, teori himpunan adalah salah satu fondasi dalam matematika kontemporer dimana sebagian besar proposisi matematik dapat dituliskan dalam bahasa teori himpunan. Melalui pandangan diatas dapat dikatakan sebagai pintu masuk pertama mengenai latar belakang Badiou mengusung teori himpunan dalam kerangka penjelasan ontologi.

Selanjutnya, pemikiran Badiou mengenai hal ini dapat dilihat secara jelas dalam *being and event*. Hal pertama tentu berkaitan dengan penjelasan sebelumnya yakni fakta mengenai hadirnya konsep *inconsistency multiplicity*, dan yang kedua adalah apa yang disebut oleh Badiou sebagai konsep *void* (kekosongan). Pertama dalam hal konsep *inconsistency multiplicity*, Badiou berusaha memberi semacam jembatan untuk menjelaskan proposisi seperti apa yang dapat menjelaskan hal tersebut. Teori himpunan adalah teori model yang sangat mendukung permasalahan tersebut, dimana dalam setiap himpunan akan didapat elemen-elemen yang membangun sebuah himpunan sekaligus menjadi model tentang *multiplicity* itu sendiri.

Sehingga, pada tahap ini dapat dilihat bahwa antara konsep *multiple* dan teori himpunan terdapat relasi yang sangat jelas. Sebuah relasi yang semakin mempermudah kita dalam melihat kerangka lebih lanjut dari ontologi yang diusung Badiou, sekaligus memberikan sebuah tantangan pada filsafat dengan

membentukannya pada kompleksitas yang terkandung dalam sisi teori himpunan itu sendiri.

Kedua, mengenai konsep kekosongan sebagai alasan atas teori himpunan yang ditarik oleh Badiou untuk menjelaskan ontologi itu sendiri. Bagi Badiou, kekosongan juga merupakan sebuah fakta yang terdapat pada setiap situasi. Ketika situasi dilekatkan dengan metode *count for one*, maka akan didapat sebuah implikasi bahwa adanya situasi yang tidak termasuk dalam hitungan tersebut. Kekosongan bagi Badiou adalah sebuah *nature of situation* yang tidak mampu dipresentasikan oleh situasi itu sendiri.

Sehingga, jika direlasikan dengan teori himpunan, kekosongan yang menjadi bagian penting dalam membangun situasi itu sendiri dapat diformulasikan dengan bahasa teori himpunan, khususnya dalam konsep *null-set*. Dalam hal ini, kekosongan adalah suatu bagian dari aksioma yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan setiap himpunan yang hendak dibahas.

Oleh karena itu sebagai sebuah pengantar awal, tulisan ini pada dasarnya memberi gambaran umum mengenai kerangka berpikir dari Badiou itu sendiri. Adapun hal teknis yang menjadi fokus utama skripsi ini tentunya akan dibahas pada bab berikutnya. Ada beragam hal yang masih dijabarkan tentunya, namun penulis mencoba untuk memlimitasi konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya agar nantinya mampu menjernihkan apa yang sebenarnya poin utama yang ingin dihasilkan dari kerangka pikiran ini.

2.4. Ikhtisar

Hal yang mendasar dari penjelasan ini adalah dimana kita mampu untuk mengenali bagaimana ontologi yang diperkenalkan oleh Badiou berkaitan erat dengan matematika, khususnya teori himpunan, dan melalui hal tersebut kita juga mampu secara perlahan menariknya kepada penjelasan lebih lanjut yakni mengenai teori model, konsep *forcing* hingga nantinya interpretasi lebih lanjut mengenai pemikiran Badiou. Apakah memang teori model memang mampu menjadi konsep yang menjabarkan keseluruhan proposisi filsafat, atau teori model juga terbuka terhadap teori matematika lainnya dalam rangka menghasilkan konsep baru lainnya dalam diskursus mengenai filsafat kontemporer.

Selain itu, dalam konteks politik, pembahasan mengenai ontologi membawa kita pada pemahaman bahwa pemikiran Badiou berusaha untuk menegaskan tentang relasi politik dengan situasi yang merupakan modifikasi atas konsep *being*. Penegasan tersebut terletak ide bahwa politik yang hendak hadirnya sebagai aktivitas yang mempertimbangkan kembali situasi-situasi yang dihadapinya.

Pertimbangan tersebut dapat dilakukan dengan adanya pengambilan jarak antara politik dengan situasi. Politik bukanlah sesuatu yang hanya mengafirmasi adanya multiplisitas sebagai sebuah naturalitas, namun politik melampaui hal tersebut dengan terus berusaha memfasilitasi setiap multiplisitas yang ada dalam suatu situasi.

Dalam konteks pemikiran Badiou, bekerjanya politik sebagai hal yang memberi ruang pada multiplisitas diwakili dengan adanya konsep *intervention* (intervensi) terhadap situasi. Intervensi adalah sebuah langkah yang didasari pada pikiran politik untuk mewujudkan setiap bagian yang hendak hidup di luar kekangan kesatuan. Intervensi adalah wujud dari apa yang seharusnya *dilakukan* oleh politik itu sendiri.

BAB 3

MATERIAL INTERVENSI

Jika pada pembahasan sebelumnya penulis telah menjabarkan gambaran umum mengenai pemikiran Alain Badiou, maka pada bab ini penulis akan mencoba melanjutkan pembahasan yang lebih bersifat teknis dan lebih fokus kepada pemikiran Badiou yang menyangkut dengan teori model matematika didalamnya. Adapun pembahan mengenai teori model akan membawa penulis pada pembahasan utama, yakni mengenai pembicaraan Badiou tentang politik. Pembahasan yang kental akan aspek matematika adalah sebuah upaya untuk memudahkan pembahasan-pembahasan yang menjadi turunan dari ontologi Badiou, termasuk tentang politik.

3.1 Teori Himpunan

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menyinggung mengenai konsep teori himpunan yang ditarik oleh Badiou dalam menjelaskan ontologi filsafat, namun pembahasan tersebut tentunya hanya sebatas mengenai latar belakang mengapa Badiou memilih teori himpunan sebagai basis ontologi.

Oleh karena itu, ada baiknya jika penulis juga mencoba memberikan penjelasan mengenai konsep teori himpunan yang nantinya akan berpengaruh kepada interpretasi lebih lanjut mengenai pemikiran Badiou itu kembali, khususnya pada permasalahan apakah terdapat celah yang memungkinkan masuknya teori lain dalam matematika untuk mendukung pemikiran Badiou, atau apakah memang teori himpunan sudah sangat komprehensif dalam menjelaskan proyek filsafat Badiou.

Kembali kepada teori himpunan, sebagai bagian dari konsep matematika kontemporer, tentu kita juga telah mengenal pembahasan mengenai teori ini di ranah akademis. Himpunan (*set*) pada dasarnya adalah konsep penting dalam matematika yang memiliki relasi penting dalam berbagai cabang matematika lainnya, seperti logika sistem bilangan, dan berbagai konsep lainnya. Himpunan dapat diartikan sebagai sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan secara jelas hadir didalamnya. Objek tersebut dapat berupa berbagai hal dalam

kehidupan manusia yang nantinya disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan adanya syarat tertentu dan kejelasan dari elemen menjadi penting untuk membedakan hal-hal yang menjadi dapat menjadi elemen dan hal-hal yang tidak dapat menjadi bagian suatu himpunan, atau disebut dengan himpunan yang terdefinisi (*well-defined set*).

Tentu dalam penjelasan mengenai teori himpunan, ada berbagai hal teknis yang menjadi bagian dari teori himpunan itu sendiri, namun dalam konteks ini, penulis akan langsung mencoba menggambarkan teori himpunan dari sudut pandang yang ditawarkan oleh Badiou agar fokus permasalahan yang akan diangkat menjadi semakin jelas.

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap fungsi teori himpunan dalam kerangka ontologi Badiou, maka bagan berikut mungkin dapat membantu penjelasan hal tersebut.



Melalui bagan diatas ada beberapa konsep penting yang dapat dijelaskan, yakni, sebagai contoh bagan diatas adalah dua himpunan (anggap himpunan X) yang memiliki empat elemen (kardinalitas), a, b, c, dan d. Elemen tersebut tentunya sudah memiliki syarat yang membuatnya menjadi bagian dari himpunan X. Sementara itu, didalam himpunan X itu sendiri juga terdapat apa yang disebut sebagai himpunan bagian atau *subset*. (dalam contoh diatas anggap saja subset Y) Dengan artian, himpunan Y dikatakan himpunan bagian (*subset*) dari himpunan bagian X jika dan hanya jika setiap elemen y merupakan elemen dari X. sehingga jika y merupakan *subset* dari X, maka X disebut sebagai *superset* dari Y.

Disisi lain, penjelasan diatas juga menarik kita kepada konsep lain, yakni himpunan kosong atau disebut sebagai *null-set*. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal = 0. Himpunan ini bukan hanya sebatas pengertian

tersebut, namun jika dihubungkan dengan himpunan bagian, maka akan didapatkan sebuah kesimpulan bahwa himpunan kosong adalah bagian dari semua himpunan. Hal ini dapat dibuktikan melalui contoh bahwa kalimat “ $c \in Y$ maka $c \in X$ ” pada pengertian himpunan bagian, akan selalu bernilai benar jika diambil $Y =$ himpunan kosong dan untuk sebarang himpunan X . hal ini disebabkan syarat cukupnya selalu tidak terpenuhi.

Dari penjelasan diatas dapat kita relasikan antara penjelasan di bab sebelumnya. Pertama, mengenai himpunan beserta elemen, hingga himpunan bagian didapat sebuah pengertian bahwa himpunan “memang” *multiple* yang disatukan. Ketika telah berada dalam himpunan maka elemen-elemen yang terkandung didalamnya tidak didefinisikan sebagai elemen yang tunggal, namun dilabeli kepada sebuah identitas lain, yakni bagian dari himpunan X .

Kedua, mengenai himpunan kosong yang menjadi bagian dari setiap himpunan, maka hal tersebut menjadi sangat berelasi dengan apa yang disebut oleh Badiou sebagai *void*. Pada tahap ini kita dapat mengatakan bahwa teori himpunan mampu memberikan gambaran sekaligus memberikan masalah dalam menjelaskan ontologi itu sendiri. Kekosongan (*void*) memang nampaknya bekerja dalam suatu himpunan, ia menjadi basis yang mutlak dan hadir dalam setiap himpunan, sama halnya ketika Badiou (2004) menjelaskan *void* sebagai *nature of situation* dimana setiap situasi mutlak dibangun oleh setiap kekosongan. “*The void of a situation is a simply what is not there, but what is necessary for anything to be there*” (p. 16).

Dua konsep diatas, yakni mengenai konsep *multiple* dan *void* selanjutnya menjadi hal yang dapat dianalisa lebh lanjut berdasarkan proyek ontologi dari Badiou. Dalam hal *multiple* yang terdapat dalam teori himpunan, Badiou memang melihat bahwa teori himpunan adalah sebuah model yang memperlihatkan fakta mengenai *unified multiple*.

Namun jika dilihat dari aksioma yang membangun operasi dalam teori himpunan, maka secara detil Badiou mencoba menganalisa sembilan aksioma untuk kemudian menjadi keputusan bahwa didalam teori himpunan pada dasarnya ada konsep yang memperlihatkan bahwa tesis matematika sebagai ontologi dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis.

Kembali kepada teori himpunan, adapun sembilan aksioma yang menjadi titik penting tersebut adalah *extensionality*, *separation*, *power-set*, *union*, *empty set*, *infinity*, *foundation*, *replacement*, dan *choice*. Sembilan aksioma tersebut muncul tentunya bukan muncul begitu saja, namun muncul sebagai hasil dalam riset yang terjadi dalam beberapa dekade dalam dunia matematika itu sendiri.

Disisi yang sama, sembilan aksioma yang menjadi basis teori himpunan dibangun atas sebuah pikiran mengenai bagaimana mencegah adanya inkonsistensi dalam teori himpunan, pencegahan tersebut tidak lain bertujuan untuk menghindarkan teori himpunan dari logika yang inkonsisten dalam matematika sebagaimana mestinya. Lantas bagaimana kita mampu memahami jalan pikiran Badiou yang menarik teori himpunan menjadi basis ontologinya sementara teori himpunan itu sendiri tidak mengandung apa yang disebut sebagai ruang *inconsistency multiple* secara mendasar?.

Hal pertama yang hendak penulis tekankan kembali adalah mengenai mental filsafat yang diperkenalkan oleh Badiou. Melalui penjelasan diatas tentunya dapat dilihat bahwa filsafat bukanlah selalu lari dari sistem yang ada, namun lebih dari itu berkonfrontasi dengan sistem hingga berani untuk mengkreasikan sistem itu sendiri.

Untuk memperjelas hal diatas, ada baiknya kita masuk kepada penjelasan yang lebih matematis yakni mengenai sembilan aksioma dalam teori himpunan tersebut. Sembilan aksioma tersebut diperkenalkan oleh dua matematikawan bernama Ernst Zermelo and Abraham Fraenkel. Adapun aksioma-aksioma tersebut dapat diringkas menjadi penjelasan berikut yang dikutip dari karya Keith Devlin berjudul *The joy of set* (1993).

1. *Axiom of Extensionality*. *If two sets have the same elements, then they are equal*. Mengenai aksioma ini, Badiou menghubungkannya dengan konsep *diferrence* dan *identity*, dimana melalui pendekatan tersebut dapat dinyatakan bahwa perbedaan dan identitas dalam teori himpunan hanya dapat dijelaskan dalam satu hal, yakni untuk menghasilkan dua himpunan yang berbeda, paling tidak ada satu elemen yang tidak dimiliki oleh salah satu himpunan tersebut.

Contoh : terdapat dua himpunan, yakni A dan B. himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dengan A adalah bilangan asli. Himpunan $B = \{1, 2, 3\}$ dimana B adalah bilangan prima. Dengan keadaan diatas jelas bahwa kedua himpunan tersebut dapat dikatakan *equal* dimana terdapat elemen yang sama, sekaligus cardinal yang sama, yakni tiga. Sehingga untuk membedakan kedua himpunan tersebut paling tidak ada satu elemen yang tidak dimiliki oleh himpunan satu sama lain, dan metode untuk menciptakan kondisi tersebut dapat dilakukan dengan aksioma penambahan (*Extensionality*). Dalam hal ini kita dapat menambahkan satu elemen, yakni angka 4 di kedua himpunan. Hasilnya himpunan $A = \{1,2,3,4\}$ dimana A tetap memenuhi sebagai himpunan bilangan asli. Sedangkan himpunan $B = \{1,2,3,4\}$ tidak memenuhi lagi bilangan prima, sehingga 4 tidak dapat dimasukkan dalam himpunan B. Oleh karena itu, A dan B menjadi berbeda, dimana terdapat elemen dan jumlah kardinal yang tidak lagi sama.

2. *Null Set Axiom. There is a set, \emptyset , which has no members.* Tentu konsep ini sudah dijelaskan dalam beberapa penjelasan sebelumnya, khususnya terkait dengan konsep *void* dalam pandangan Badiou. Namun permasalahan lebih lanjut terdapat pada bagaimana melihat hal ini dalam hal teknis teori himpunan. Himpunan kosong bukan sekedar himpunan yang tidak memiliki anggota didalamnya, namun kekosongan tersebut menjadi penting karena ia juga menjadi hal penting dalam membangun sebuah himpunan.
3. *Axiom of Infinity. There is a set x such that $\emptyset \in x$ and such that $\{a\} \in x$ whenever $a \in x$.* Aksioma ini mengatakan bahwa ada suatu himpunan a dimana \emptyset anggota a maka untuk sebarang $x \in a$ berlaku $(x \cup \{x\}) \in a$.
4. *Power Set Axiom. If x is a set, there is a set, $P(x)$, consisting of all and only the subsets of x .* Aksioma ini menjelaskan bahwa untuk sebarang himpunan x maka terdapat himpunan y yang beranggotakan semua himpunan dimana anggotanya juga merupakan anggota dari x dengan kata lain y memuat semua himpunan bagian dari x
5. *Axiom of Union. If x is a set, there is a set, Ux , consisting of all elements of all elements of x .*

6. *Axiom of Replacement.* Let $\phi(v_n, v_m)$ be any formula of LAST, such that for each set a there is a unique set b such that $\phi(a, b)$. Let x be a set. Then there is a set y consisting of just those b such that $\phi(a, b)$ for some a in x .
7. *Axiom of Subset Selection.* Let x be a set, and let $\phi(v_n)$ be a formula of LAST. Then there is a set consisting of just those a in x for which $\phi(a)$.
8. *Axiom of Foundation.* If x is a set, there is an $a \in x$ such that $a \cap x = \emptyset$.
9. *Axiom of Choice.*

Tentu semua konsep diatas tidak akan dijelaskan secara lebih mendetail, apalagi dalam hal teknis matematis. Namun apa yang hendak dijelaskan diatas adalah bagaimana setiap aksioma tersebut memiliki konsekuensi pada diskursus kita mengenai filsafat, khususnya dalam hal teori himpunan dan relasinya dengan ontologi yang dibangun oleh Badiou. Konsekuensi tersebut sejauh ini dapat dilihat dari berbagai konsep, seperti himpunan yang berelasi dengan pembicaraan mengenai situasi, konsep *void* yang berelasi dengan konsep *infinity*, dan yang tidak kalah penting adalah konsep yang nantinya menjadi pembahasan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah bagaimana menarik aksioma-aksioma yang terdapat dalam teori himpunan agar berelasi dengan teori limit melihat situasi politik

Namun sebelumnya, penulis akan mencoba memperkuat basis penjelasan dari sudut pandang Badiou terlebih dahulu, agar nantinya teori yang akan diinterpretasi lebih lanjut dapat dipahami secara jernih tentunya.

Adapun penarikan permasalahan diatas dalam kerangka matematika tidak lain adalah sebuah usaha untuk menjawab paradoks yang sebelumnya terdapat dalam diskursus matematika itu sendiri. Permasalahan tersebut terkenal dengan apa yang disebut sebagai paradoks Russel (*Russel's paradox*). Dalam hal teori himpunan, pada tahun 1902 Bertrand Russel melontarkan sebuah permasalahan yang cukup menyita perhatian dunia matematika saat itu. Paradoks tersebut dapat dipahami dengan contoh yang Russel sebut sebagai paradoks tukang cukur.

Di suatu desa terpencil hidup seorang tukang cukur, dia adalah **satu-satunya** tukang cukur didesa tersebut. Semua orang didesa tersebut mencukur rambutnya sendiri **atau** dicukuri oleh si tukang cukur dan si tukang cukur **hanya** mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri.

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah si tukang cukur mencukur rambutnya sendiri?. Jika iya, akan terdapat kontradiksi dimana pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa si tukang cukur hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Sedangkan jika tidak, itu berarti si tukang cukur harus pergi ke tukang cukur lainnya, namun kembali kepada situasi bahwa di daerah tersebut hanya dialah yang menjadi satu-satunya tukang cukur. Adanya kontradiksi tersebut jelas membuat suatu inkonsistensi dalam logika.

Russel menjelaskan hal tersebut sebagai ilustrasi dimana terdapat himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri. Konsep ini dijelaskan dalam notasi :

$$R = \{A \mid A \notin A\}$$

Dengan artian, A elemen R jika dan hanya jika A bukan elemen dari A. Jika kita relasikan dengan ilustrasi sebelumnya, yakni apakah R elemen dari R?, apakah si tukang cukur mencukur rambutnya sendiri?. Tentu kita akan selalu mendapatkan kontradiksi pada permasalahan tersebut. Sehingga himpunan R diatas dikenal dengan paradoks Russel.

Gambaran diatas menjelaskan bahwa sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh Russel adalah dalam teori himpunan terdapat inkonsistensi. Ada ketidakpastian dalam matematika, dan ini tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius dalam bagaimana kita melihat matematika sebagai bahasa, bukan hanya sebagai ilmu pasti seperti yang kita kenal selama ini.

Oleh karena itu, Zermelo-Fraenkel berusaha untuk menjawab permasalahan tersebut. Perumusan aksioma-aksioma tersebut menjadi penting agar teori himpunan tidak lagi terjebak kepada permasalahan yang dilontarkan oleh Russel sebelumnya.

Usaha tersebut dapat dilihat secara jelas pada aksioma fondasi, aksioma pemisahan, dan aksioma pilihan. Seperti yang telah dijelaskan diatas (pada bagian sembilan aksioma ZFC), maka secara jelas paradoks dari Russel melanggar aksioma pemisahan (*separation*), dimana notasi $R = \{A \mid A \notin A\}$ tidak dapat dituliskan sebagai notasi dalam teori himpunan.

Namun apa yang dibuktikan oleh ZFC melalui aksioma tersebut tidak sepenuhnya menjawab permasalahan dari Russel. ZFC hanya mengatakan bahwa

paradoks dari Russel melanggar aksioma pemisahan, sehingga notasi tersebut bukanlah sebuah himpunan.

Dari jalan pikiran inilah Badiou mencoba mengambil jarak tentang adanya permasalahan yang mendasar dalam relasi *being* dengan bahasa. Apa yang dilontarkan oleh Russel hingga kemudian coba dipecahkan oleh ZFC membuktikan bahwa *being* hidup dalam *excess of language*. Pada tahap ini penulis mencoba mengambil kesimpulan sementara bahwa melalui aksioma pemisahan akan selalu ada penambahan formula pada himpunan agar ia hadir secara efektif, disisi lain Badiou juga menyatakan bahwa eksistensi elemen yang tidak terdefinisi harus selalu diasumsikan hadir dalam setiap himpunan, karena fakta yang selalu menjelaskan bahwa *being* terkurung dalam bahasa yang terbatas.

Penjelasan diatas tentunya juga berkaitan erat dengan politik. Melalui sebuah kerangka berpikir yang dimulai dari konsep teori himpunan hingga akhirnya pada perjumpaan mengenai sebuah fakta adanya paradoks yang tidak terselesaikan semakin menegaskan bahwa politik dalam pandangan Badiou adalah hal yang juga tidak pernah selesai.

Sebuah sistem yang konsisten tidak akan pernah mampu memuat semua hal didalamnya, karena pada akhirnya akan selalu terdapat inkonsistensi didalam sebuah himpunan itu sendiri. Sehingga, menjadi sebuah kejanggalan ketika politik dalam penerapannya justru menyusup dalam sistem untuk mengafirmasi setiap situasi menjadi finalitas, seperti yang terdapat dalam konsep *the state*. Politik hendaknya berada dalam posisi yang bersebrangan akan praktek tersebut. Melalui politiklah, ketidakmampuan sebuah sistem dalam mencakup semua situasi ditegaskan dengan memberi kemungkinan pada sebuah situasi untuk tampil secara tunggal tanpa lagi hidup dalam naungan sistem tersebut. Politik berperan sebagai suatu hal yang menyusup dalam paradoks kesatuan sistem untuk kemudian memecahnya menjadi sebuah himpunan yang baru.

Tentu pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana politik mampu mendeteksi situasi seperti apa yang hendak dipecah tersebut?, Badiou menjawab pertanyaan tersebut melalui konsep yang disebut sebagai *evental site*. Sebuah konsep yang hidup dalam sebuah sistem namun sekaligus menjadi

material penting agar politik melalui intervensi dimungkinkan untuk tampil memecah sebuah himpunan menjadi sebuah kumpulan yang baru tentunya.

3.2 *Evental Site*

Mengenai konsep *infinity*, dalam teori himpunan memang tidak dijelaskan secara menyeluruh adanya konsep tersebut. Namun dalam hal adanya himpunan yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian tertentu, teori himpunan jelas mendukung hal tersebut, khususnya dalam aksioma *power-set*. Bagi Badiou, aksioma ini berelasi erat dengan term meta-ontologi, yakni apa yang disebut sebagai struktur situasi.

Permasalahan ini dapat kita contohkan dengan ilustrasi mengenai aksioma *power set*. Terdapat sebuah contoh himpunan Jika $A = \{ 1, 2 \}$, maka $P(A) = \{ \emptyset, \{ 1 \}, \{ 2 \}, \{ 1, 2 \} \}$

Dari penjelasan diatas, Badiou menyatakan bahwa *multiple* yang terdapat dalam himpunan memang dipecah menjadi bagian-bagian, namun tetap dikenakan dengan konsep *count-for-one*. Dengan artian, aksioma ini bekerja sebagai representasi dari presentasi dari sebuah himpunan. *Multiple* yang dipecah memang bertambah dalam konteks bertambahnya kardinal himpunan tersebut, namun *multiple* tersebut masih berada dalam satu himpunan, yakni dalam kerangka himpunan kuasa.

Berangkat dari hal tersebut, Badiou (2004) membedakan situasi menjadi tiga jenis, yakni *natural*, *neutral*, dan *historical situation*. Pembedaan tersebut juga tidak lepas dari adanya tiga macam jenis *multiple*, yakni *normal multiple* (dimana ia dikenakan konsep *count-for-one* dua kali. *Excrecent multiple* yang hanya direpresentasikan oleh *state*, dan *singular multiple* yang hadir sebagai presentasi dan kemudian lenyap ketika adanya usaha untuk melekatkannya dengan konsep *count-for-one*.

Natural situation diartikan sebagai situasi yang tidak memiliki *multiple singular* didalamnya, semua elemen berjalan normal, yang ada hanya soal presentasi dan representasi dari *multiple* terhadap situasi dimana ia tinggal. *Neutral situation* diartikan sebagai situasi yang dibangun atas singular, normal dan *excrecent multiple* didalamnya. Sedangkan *historical situation* adalah situasi

dimana didalamnya terdapat paling tidak satu konsep yang disebut sebagai *evental-site*, atau dapat dikatakan sebagai sub-tipe dari model *singular mutilple*.

Evental site diperkenalkan Badiou sebagai sebuah konsep yang sangat penting dalam membedakan setiap situasi yang berhubungan dengan teori himpunan. *Evental site* sama halnya dengan elemen dalam sebuah himpunan, namun jika elemen dalam teori himpunan diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh himpunan itu sendiri, maka lain halnya dengan *evental site*, dimana ia berada dalam himpunan atau situasi tertentu namun sekaligus tidak dimiliki oleh himpunan itu sendiri. Tentu konsep ini sangat berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam teori himpunan, khususnya dalam aksioma himpunan kuasa dimana himpunan yang dipecah menjadi beberapa himpunan bagian akan selalu dihitung menjadi bagian dari himpunan itu sendiri, bukan sebagai singular elemen yang berada dalam pembicaraan himpunan tersebut.

Dalam Badiou (2004) untuk memahami konsep diatas, ia menjelaskannya melalui beberapa ilustrasi. Mengenai *natural situation* dapat diwakili dengan ilustrasi mengenai ekosistem sebuah sungai. Dalam hal ini, ekosistem tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah himpunan yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti ikan, air, batu, dan berbagai makhluk lainnya. Setiap elemen tersebut juga merupakan representasi dari pembicaraan kita mengenai ekosistem sungai. Badiou juga mengkualifikasikan hal ini dengan memakai kata *knowledge of situation*. Dalam hal ini, ekosistem sungai hanya berada dalam level *knowledge* dan elemen yang terdapat didalamnya dapat disebut sebagai *known element*.

Mengenai kedua penggunaan kata tersebut, Badiou pada dasarnya ingin menegaskan bahwa dalam *natural situation* yang hanya dapat kita lihat adalah sebatas pengetahuan akan situasi tersebut. Dalam hal ekosistem sungai, kita hanya mendapat pengetahuan tentang apa itu yang dimaksud dengan ekosistem sungai. Bagi Badiou, pengetahuan tidak lain adalah repetisi mengenai nilai-nilai yang ada dalam keseharian kehidupan manusia. Repetisi yang terus terjadi menghasilkan suatu hal yang disebut sebagai pengetahuan, sehingga elemen-elemen yang terdapat didalamnya juga elemen yang *known*, dapat diketahui, sekaligus memang itulah yang hadir dalam setiap situasi tersebut. Semua elemen yang beragam tersebut hanya elemen yang normal, hanya elemen yang bekerja sebatas presentasi

dan representasi, tidak ada sesuatu yang baru disana, karena semuanya berjalan dalam kontingensi yang tetap dalam aturan tentang sebuah himpunan mengenai ekosistem sungai.

Sekarang mari kita lihat dengan contoh yang mewakili *historical situation*. Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh mengenai Negara Australia yang dibangun bukan dari penduduk pribumi, melainkan dari imigran berbagai Negara di luar Australia. Memang secara sosial ekonomi maupun perkembangan budaya, penduduk imigran dapat dikatakan sebagai elemen yang menjadi presentasi sekaligus representasi dari Australia, namun tidak satupun dari imigran tersebut yang dapat disebut sebagai *singular multiple*, karena tidak memenuhi mental dari *singular multiple* seperti yang telah dijelaskan oleh Badiou sebelumnya. Namun justru yang patut dilekatkan dengan *singular multiple* tidak lain adalah suku aborigin sebagai elemen yang membentuk *evental-site*.

Evental site yang dibentuk oleh suku aborigin belum berisi konten apapun yang dapat kita baca secara jelas, namun alasan untuk menyatakan hal ini dilatar belakangi oleh Australia yang dibangun pada tanah yang mereka sendiripun tidak pun tidak diakui kehadirannya sebagai Australia. Dengan artian, suku aborigin adalah *singular multiple* yang mempunyai modal untuk merubah definisi Australia selama ini. Aborigin memiliki potensi untuk mempresentasikan diri, namun tidak merepresentasikan diri sebagai elemen dari Australia yang selama ini dipahami.

Singkatnya, dalam *historical situation* terdapat *evental site* yang mempunyai modal untuk menghasilkan sesuatu yang baru, merubah sesuatu yang berjalan secara tetap selama ini, ataupun mentransformasi situasi menjadi situasi yang tidak pernah didefinisikan sebelumnya.

Namun *evental site* juga bukan merupakan satu-satunya yang mampu menjadi syarat agar perubahan tersebut terjadi. Badiou menegaskan terdapat konsep lain yang tidak kalah penting dalam kerangka menghasilkan himpunan yang baru, konsep tersebut yang disebut sebagai peristiwa (*event*) dan kesetiaan (*fidelity*). *Event* dalam hal ini bagi Badiou bukanlah *event* yang bersifat *ordinary*, namun lebih dari itu, peristiwa tersebut adalah momen yang tidak terikat oleh apapun, dan juga tidak didasarkan pada atribut-atribut lain, termasuk sejarah.

Sedangkan kesetiaan adalah konsep dimana subjek yang bertahan dalam *event* yang terjadi pada situasi tertentu yang kemudian berusaha untuk memberi label terhadap *event* yang terjadi sehingga apa yang terjadi dalam situasi tersebut dapat dipahami secara efektif oleh elemen-elemen yang terdapat didalam usaha menciptakan suatu himpunan yang baru.

Dalam pembicaraan mengenai politik, kesetiaan menjadi sebuah hal yang khas, karena melalui adanya kesetiaan, politik semakin dekat dengan konteks *the real* itu sendiri. Dengan artian, kesetiaan adalah gambaran dimana politik selalu diisi dengan sekelompok subjek yang berada dalam suatu ruang dan waktu tertentu.

Kesetiaan yang menjadi materi dari intervensi memberi sebuah penjelasan bahwa politik bukanlah sebuah tindakan yang reaktif, ataupun sebuah tindakan yang timbul-lenyap begitu saja. Bagi Badiou, dengan adanya kesetiaan dalam intervensi, maka politik selalu memiliki kemungkinan untuk dievaluasi dalam suatu waktu, sehingga kebaruan yang dicapai bukanlah sebuah kebaruan tanpa diikuti oleh pikiran untuk tinggal dalam konsekuensi yang dihasilkan, namun kesetiaan menjaga bahwa setiap konsekuensi yang dihasilkan akan selalu dapat dipertanggungjawabkan melalui pikiran politik itu kembali.

Pembahasan mengenai konsep material intervensi ini tentu adalah sebuah hal yang penting dalam tulisan ini. Mengenai kaitan antara konsep kesetiaan dan politik, penulis akan memaparkannya lebih lanjut pada bagian intervensi politik secara khusus. Namun sebelum masuk kepada penjelasan tersebut, terdapat satu konsep lagi yang perlu dijelaskan secara detail, yakni mengenai konsep *Forcing* dalam konteks teori himpunan.

3.3 *Forcing*

Dalam sebuah artikel yang berjudul *What is forcing*, Thomas Jech (2008) seorang professor matematik dari Universitas Pennsylvania menjelaskan dengan singkat genealogi dari munculnya konsep *forcing*. Konsep ini dijelaskan sebagai konstruksi model dalam teori himpunan yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Cohen pada tahun 1963. Dalam hal ini, kita dapat memahami beberapa konsep penting yang menjadi basis konsep *forcing*.

Pertama, metode ini pertama kali dimana konsep ini digunakan untuk membuktikan apa yang disebut sebagai *Independence of Continuum Hypothesis* (CH). Adapun CH muncul sebagai permasalahan dalam teori himpunan yang berawal dari himpunan bilangan natural dengan bilangan riil. Pada tahun 1873, Geor Cantor seorang matematikawan asal Rusia menjelaskan bahwa CH adalah sesuatu yang bersifat *uncountable*, dimana kita tidak dapat memetakan secara korespondensi satu-satu antara himpunan bilangan asli dengan himpunan bilangan riil.

Jika dikenakan dengan relasi melalui konsep korespondensi satu-satu, maka didapat hasil bahwa korespondensi satu-satu tidak berlaku dalam himpunan bilangan riil dengan bilangan asli. CH memang sulit untuk didefinisikan dalam kalimat yang sederhana, namun pada tahap ini, CH hanya dapat dipahami sebagai konsep yang menunjukkan bahwa ada level yang lebih tinggi mengenai konsep infiniti dalam matematika.

Hal ini dapat dilihat dari model matematis berikut:

misalkan : $2^{n_0} > n_0$,

dimana 2^{n_0} dan n_0 adalah kardinalitas dari himpunan bilangan riil dan himpunan bilangan asli (natural). Tentu kedua kardinalitas tersebut adalah bilangan yang bersifat *finite*. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah ketika kita mengganti n_0 menjadi n_1 sebagai suksesornya lantas kemudian kita mendapatkan hasil bahwa $2^{n_0} = n_1$?

Sebagai contoh praktis kita dapat merelasikannya dengan tabel berikut :

n_0	2^{n_0}	n_{0+1}
0	1	1
1	2	2
2	4	3
3	8	4
4	16	5

Tabel diatas adalah semacam gambaran sederhana akan apa yang dipertanyakan oleh Cantor dalam permasalahan mengenai CH. Artinya ada semacam asumsi (*conjecture*) bahwa CH dapat diserhanakan melalui pernyataan bahwa $2^{n_0} = n_1$ sehingga *continuum* akan didapatkan pada titik tersebut. Namun permasalahan Cantor terletak pada bagaimana menentukan secara pasti letak dimana pernyataan diatas sesuai. Jika dilihat dari tabel diatas maka didapat hasil bahwa pernyataan tentang CH dalam perspektif Cantor hanya berlaku saat kardinalitas 0 dan 1, tetapi tidak berlaku bagi kardinalitas lainnya. Pada tahap ini Cantor hanya menyebutkan bahwa CH adalah konsep yang tidak dapat dihitung (*uncountable*). Hal ini didasari pada semakin tinggi kardinalitas maka akan didapat hasil yang divergen, menyebar, dan *infinite*.

Namun bagi Cohen, permasalahan yang dihadapi oleh Cantor dilihat dalam sudut pandang lain sebagai solusi. Baginya, CH bukanlah konsep yang bersifat tidak dapat dihitung (*uncountable*) namun justru tidak dapat diputuskan secara pasti (*Undecidable*). Dengan artian, Cohen tidak menyatakan bahwa $2^{n_0} = n_1$ sekaligus juga tidak menyatakan bahwa $2^{n_0} \neq n_1$.

CH sendiri juga tidak dapat diletakkan sebagai bagian dari aksioma, termasuk aksioma yang telah dibangun oleh ZFC sebelumnya dalam teori himpunan. Dengan latar belakang itulah, Paul Cohen mengungkapkan bahwa CH adalah konsep yang bersifat *undecidable*.

Hal kedua yang perlu dicermati adalah mengenai apa yang dimaksud dengan *undecidable* itu sendiri. Dalam matematika dikenal bahwa untuk membangun sebuah kebenaran tidak lepas dari bagaimana memberi bukti pada teorema yang diajukan. Pembuktian tersebut dilakukan dengan memberikan *conjecture* sebagai jalan atas pembuktian akan teorema, dan sebaliknya teorema dapat ditolak dengan menemukan bukti akan negasi terhadap asumsi yang diajukan. Permasalahan yang terdapat dalam CH jelas berada pada *conjecture* tersebut dimana tidak terdapat mengenai bukti mengenai adanya *conjecture* dan juga tidak terdapat bukti mengenai negasinya.

Hal diatas berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya mengenai aksioma ZFC, dimana ditegaskan bahwa teori himpunan memiliki aturan yang lebih ketat sebagai antisipasi atas paradoks yang dilontarkan oleh Bertrand Russell.

Sehingga semua aksioma tersebut bekerja untuk memverifikasi setiap notasi atas sebuah himpunan, apakah dapat diterapkan pada himpunan atau tidak. Asumsi mengenai aksioma ZFC yang ketat ternyata masih menyisakan kekurangan dalam menjawab permasalahan ini. Dengan artian, ZFC juga belum mampu menjawab CH, dengan demikian ZFC juga bukan merupakan sebuah sistem yang komplit dalam kerangka teori himpunan.

Ketiga, adanya kekurangan dalam aksioma ZFC menjadi pintu masuk bagi pemikiran lain, yakni apa yang disebut *incompleteness theorem* dari Godel pada tahun 1931. Godel menyatakan bahwa dalam pembahasan mengenai aksioma himpunan akan selalu ada kekurangan didalamnya. Dengan kata lain, konsep *undecidable* selalu hadir dalam teori himpunan.

Keempat, kita sampai kepada konsep utama, yakni metode *forcing* yang diperkenalkan oleh Paul Cohen untuk menjawab permasalahan diatas. Sebelumnya, Cohen sendiri menegaskan bahwa CH memang suatu konsep yang tidak dapat diputuskan dalam konteks bagaimana merelasikan dua himpunan yang berujung kepada ketakberhinggaan, dan CH pun juga tidak dapat diberlakukan begitu saja dalam aksioma dari ZFC, dengan kata lain CH juga bersifat independen. Namun bagi Cohen, permasalahan infinitas tersebut dapat sejenak diselesaikan dengan memberlakukan metode *forcing* kepada himpunan tersebut.

Untuk menjelaskan bagaimana konsep *forcing* bekerja dalam menghasilkan sebuah transformasi himpunan, maka konsep tersebut juga berelasi erat dengan apa yang disebut sebagai *generic set*. Konsep ini menjadi penting karena melalui *generic set* kita mengetahui secara komprehensif akan apa yang dimaksud dengan metode *forcing* dalam teori himpunan. Kita dapat mengilustrasikan *generic set* melalui sebuah contoh matematis berikut.

Dalam suatu kesempatan, Alfin seorang mahasiswa departemen matematika menemukan sebuah kertas yang berisikan angka-angka, 1-10. Namun pada angka-angka 1, 4, 9 terdapat sebuah kekhasan yakni dimana angka-angka tersebut ditulis dengan gaya tulisan yang berbeda. Ketika ia menemukan kertas tersebut, Alfin mendiskusikannya dengan Agung, teman yang juga mahasiswa departemen matematik. Diskusi tersebut tentunya mempunyai satu tujuan yakni berupaya untuk mendefinisikan keganjilan yang mereka dapati.

Secara sederhana, mereka memisahkan angka-angka yang memiliki kekhasan tersebut melalui suatu formula sederhana dalam bahasa teori himpunan, yakni $a \in G$ dan $a \notin G$. Dengan dasar tersebut, didapat himpunan yang menyatakan $\{ 1 \in G, 2 \notin G, 3 \notin G, 4 \in G, 9 \in G \}$. Situasi tersebut tentunya mempermudah langkah selanjutnya yakni dengan memberi irisan kepada himpunan diatas, dengan hasil $G \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} = \{1, 4, 9\}$.

Contoh diatas adalah gambaran mengenai *forcing* beserta *generic set* yang menjadi bagian penting dalam proses transformasi sebuah himpunan. Berdasarkan contoh, ketika Alfin menemukan deret yang khas tersebut, maka itulah yang disebut sebagai *the new experience* karena terdapat *new model* dalam situasi yang dihadapi seseorang akan sebuah deret bilangan. Selanjutnya, ketika mereka memisahkan bilangan-bilangan yang khas tersebut dalam suatu himpunan lain lalu kemudian mendapatkan hasilnya, maka dari titik tersebut konsep *forcing* mulai bekerja. *Forcing* bukan hanya persoalan bagaimana pada sebuah himpunan yang baru, namun ia sudah mulai berperan dalam menghasilkan modal yang tidak alah penting, yakni *generic set* itu sendiri, yang dalam konteks ini, *generic set* adalah bilangan dalam terkumpul dalam himpunan $G = \{1, 4, 9\}$.

Perlu ditekankan bahwa definisi dari *generic set* itu sendiri adalah himpunan bagian yang selalu dianggap sebagai himpunan yang baru sejauh ia tidak dapat dikenali dengan bahasa. Dengan artian, proses untuk mencapai *generic set* adalah proses dimana kita mencoba mendeskripsikan suatu himpunan secara terbatas (*finite*), sehingga proses transformasi sebuah himpunan menjadi himpunan baru akan selalu dihadapkan pada suatu tantangan lain yakni mengenai adanya sesuatu yang tidak dapat kita kenali (*indiscernibility*) dalam elemen *generic set*.

Namun bagi Cohen, tentunya konsep *indiscernibility* akan menjadi sebuah konsep yang samar dalam kerangka teori himpunan, sehingga baginya suatu usaha yang paling mungkin adalah dengan terus mendeskripsikan himpunan yang “baru” tersebut dalam bahasa yang terbatas. Oleh karena itu, *forcing* pada akhirnya juga berperan dalam melabeli *generic set*. Suatu metode dimana himpunan dapat dikenali dalam konteks yang hadir secara efektif, bukan lagi

berhenti pada pikiran tentang adanya suatu yang tidak dapat diketahui dalam perjumpaan kita akan sesuatu yang “baru” tersebut.

Kembali pada contoh diatas, pada akhirnya himpunan yang sebelumnya hanya dapat dilabeli dengan himpunan G yang beranggotakan elemen angka 1, 4 dan 9, melalui *forcing* himpunan dengan elemen-elemen yang terdapat didalamnya dapat dilabeli dengan identitas yang bahasa yang terbatas (bahasa yang telah ada sebelumnya) namun dengan suatu kondisi yang baru, yakni himpunan deret bilangan kuadrat dimana anggotanya adalah angka 1, 4, dan 9.

Himpunan dengan identitas deret bilangan kuadrat tentunya bukan asing lagi dalam bahasa matematik khususnya, namun yang terpenting adalah himpunan ini adalah himpunan yang baru, dengan elemen-elemen yang baru sebagai hasil dari metode *forcing* atas *initial set* yang sebelumnya, yakni bilangan 1-10.

Melalui gambaran sederhana ini penulis ingin membawa sebuah jalan pikiran dimana pada akhirnya terdapat relasi yang jelas antara metode ini dengan apa yang sebelumnya disebut Badiou sebagai konsep *intervention*. *Forcing* tidak lain adalah konsep yang diadopsi oleh Badiou dalam menerangkan filsafatnya dalam setiap kesempatan, baik itu dalam politik, film, seni, dan berbagai hal lainnya yang layak untuk diperbincangkan dalam bahasa filsafat.

Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bagaimana semua hal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat dalam suatu hal penting lainnya, yakni bekerjanya intervensi dalam politik. Tentu pembicaraan mengenai matematika sebagai ontologi sebelumnya sudah cukup menguras waktu dan pikiran kita, namun semua penjelasan matematik diatas tidak lain adalah sebuah pikiran yang coba penulis jabarkan agar setiap duduk permasalahan yang dilontarkan Badiou menjadi tidak kabur.

Sebagai kesimpulan dalam bagian ini, penulis perlu menekankan bahwa apa yang disebut sebagai matematika adalah semacam model berpikir yang didalamnya terdapat aksioma-aksioma mengenai suatu hal yang dapat kita relasikan dengan kehidupan nyata sebagai *human being*. Disisi yang sama, adapun tugas metode *forcing* sebagai bagian dari pemodelan tersebut bagi penulis menjadi semacam jalan untuk mendefinisikan yang “tak hingga” untuk hadir secara efektif dalam bahasa kita sebagai manusia. Lebih lanjut, cara tersebut bagi penulis adalah

semacam jalan yang berelasi erat dengan bagaimana Badiou melihat relasi filsafat dan politik. Indikasi adanya potensi *power* dalam *forcing* adalah kunci utama bagaimana nuansa politik sangat kental dalam permasalahan ini.

Kembali pada contoh sebelumnya mengenai cara *forcing* bekerja dalam mendefinisikan himpunan G adalah dengan mengasumsikan bahwa adanya a yang menjadi elemen G dan adanya yang bukan elemen G. Perbedaan tersebut tentunya tidak berasal dari himpunan itu sendiri, adanya pikiran dari luar yang secara politis mempunyai kekuasaan terhadap himpunan G tersebut. Himpunan G dalam konteks ini hanya semacam “objek” dimana kita mampu membaca secara efektif tentang pengertian himpunan G beserta elemen-elemen yang membangunnya sebagai hasil atas tindak dari *forcing*.

Oleh karena itu, tentu muncul pertanyaan lainnya, politik semacam apa yang mampu direlasikan dengan basis ontologi diatas, bagaimana metode *forcing* bekerja dalam kejadian politik yang *real*, apakah memang dapat diberlakukan, atau pada akhirnya ini hanyalah sebuah diskursus yang dibatasi oleh bahasa matematika semata. Sehingga melalui penjabaran materi diatas, didapat sebuah jembatan yang memberi jalan bagi kita dalam melihat konsep intervensi dalam politik. Sebuah jembatan yang berisikan materi yang memungkinkan terjadinya intervensi dalam politik.

3.4 Intervensi Dalam Politik

Sebelum penulis mencoba memberikan gambaran mengenai intervensi dalam politik, mungkin ada baiknya kita juga mengenal konsep intervensi yang lebih populis dalam keseharian agar nantinya dapat menjadi sebuah komparasi terhadap konsep intervensi yang ditawarkan oleh Badiou.

Dalam hal ini, kata intervensi mungkin sudah acap kali didengar atau mungkin digunakan dalam bahasa keseharian. Jika ditelik pada arti kata *intervention* itu sendiri, maka didapat makna bahwa kata *intervention* diartikan sebagai upaya untuk menghentikan sesuatu yang tengah terjadi.

Konsep *intervention* juga telah menjadi sebuah budaya dalam keseharian kelompok masyarakat tertentu. Sebagai gambaran, penulis mengambil sebuah kejadian yang menggambarkan hal tersebut, yakni diambil dari salah satu episode

serial televisi yang cukup terkenal di Amerika Serikat akhir-akhir ini, yakni *How I Met Your Mother*.¹

Dalam salah satu episodenya, terdapat gambaran mengenai kata *intervention* yang digunakan untuk menghentikan kebiasaan, perilaku, ataupun aktivitas dalam kesehariannya. Intervensi dilakukan karena seseorang tersebut tidak mampu lagi mengontrol kebiasaannya sehingga kebiasaan tersebut bersifat destruktif baik bagi dirinya sendiri, maupun lingkungan sekitarnya. Di dalam serial tersebut dicontohkan dengan adanya intervensi mengenai berbagai hal, seperti kebiasaan meminum minuman keras, kebiasaan memakai aksesoris yang aneh, dan berbagai contoh lainnya.

Singkatnya, intervensi dilakukan oleh pihak luar sebagai upaya untuk normalisasi seseorang dalam kesehariannya. Ketika ia merubah dirinya menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda dan ia tidak mampu mengontrol hal tersebut, maka intervensi dilakukan agar kembali pada situasi semula.

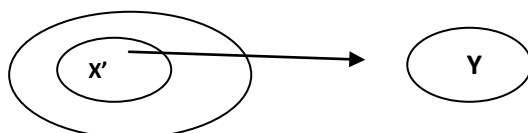


Namun apakah konsep intervensi di atas sama halnya dengan intervensi yang dimaksud oleh Badiou. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kembali kepada asal usul dari konsep intervensi bagi Badiou. Dengan artian, jika ditelik dari konsep *forcing*, maka didapat gambaran bahwa konsep intervensi yang diusung oleh Badiou berbeda dengan intervensi yang dikenal dalam keseharian. Perlu ditegaskan bahwa konsep intervensi bukanlah sesuatu yang bentuk dari politik yang reaktif, namun intervensi adalah sesuatu yang hadir dengan sebuah latar belakang, didasari pada sebuah persiapan akan berbagai materi yang mensponsori dimungkinkannya sebuah intervensi.

Jika dalam intervensi yang dikenal sebelumnya ada kecenderungan untuk menghentikan tentang terjadinya “sesuatu yang baru”, maka intervensi bagi Badiou justru mempertegas kebaruan tersebut. Intervensi bekerja untuk

¹ How I Met Your Mother adalah serial televisi yang diproduksi di Amerika Serikat. Serial ini telah ditayangkan sejak tahun 2005 (season 1), hingga sekarang (tahun 2012) telah memasuki season ketujuh.

memberikan identitas tentang kehadiran sesuatu yang baru, sesuatu yang mutlak terpisah dari rezim sebelumnya dimana ia bernaung.



Jika sebelumnya X' masih menjadi bagian dari X , maka dengan intervensi X' ditarik pada sebuah situasi yang berbeda, sesuatu yang baru, dan proses tersebut berujung kepada penamaan baru, yakni Y . sehingga, intervensi menolak adanya normalisasi terhadap sesuatu hal, normalisasi justru adalah sesuatu yang harus dilawan dalam rangka memperjuangkan keberagaman individu dalam suatu kelompok, masyarakat, ataupun negara, karena dengan adanya intervensi, kontingensi akan selalu dimungkinkan untuk terus terjadi, produksi yang *real* akan selalu terjadi, termasuk dalam hal politik.

Bagi penulis, kerangka pikiran Badiou dalam menjelaskan politik, sama halnya dengan penjelasan yang berkuat mengenai teori himpunan atau penjelasan sebelumnya mengenai basis ontologi Badiou. Terdapat semacam syarat yang membuat sesuatu tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka politik, yakni politik selalu berurusan dengan beberapa hal, pertama politik berelasi dengan sesuatu yang majemuk dalam suatu *society*. Kedua, berkaitan dengan adanya ruang kosong dalam *society* tersebut, dan yang ketiga, politik juga memiliki pikiran untuk mengakui adanya sesuatu yang tak berhingga. Namun yang paling penting, ketiga hal tersebut bagi Badiou juga membungkus pikiran utama dalam politik, yakni mengenai keadilan. Ketika kita berbicara politik, yang menjadi pokok permasalahan adalah berbicara mengenai keadilan itu sendiri, bukan politik sebagai kekuasaan semata, politik dalam parlemen, apalagi politik dalam perbincangan mengenai administrasi semata.

Sehingga untuk menjelaskan politik, tentu tidak serumit pembahasan sebelumnya dikarenakan inti dari penjelasan tersebut pada dasarnya telah terdapat dalam rangkaian ontologi, yang perlu kita pahami adalah tinggal bagaimana ontologi tersebut dikonversikan dalam bahasa politik, yakni bahasa mengenai

transformasi keadilan. Transformasi tersebut tentunya dapat dipahami sebagai bekerjanya konsep *evental site*, *fidelity subject*, dan *event* dalam sebuah himpunan atau sebuah kumpulan masyarakat.

Kembali kepada tiga syarat mengenai pembahasan akan politik, pertama mengenai relasinya dengan kemajemukan. Hal ini ditegaskan oleh Badiou (2005) dalam karyanya yang berjudul *Metapolitic* :

"An event is political if the material is collective, or if the event can only be attributed to a collective multiplicity. 'Collective' is not a numerical concept here. We say that the event is ontologically collective to extent that it provides the vehicle for virtual summoning of all. 'Collective' means immediately universalising. The effectiveness of the politics relates to the affirmation according to which 'for every x, there is thought'". (p. 141)

Kejadian politik bagi Badiou adalah sesuatu yang mengandung unsur kolektif didalamnya. Kolektif yang dimaksud oleh Badiou bukan sekedar konsep kuantitas, namun lebih kepada adanya pikiran yang sama dalam suatu komunal untuk mengartikulasikan identitas mereka sendiri, bukan lagi dibentuk oleh *The One*.

Tentu, prosedural akan politik dapat dikatakan sebagai sebagai prosedural kebenaran. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yakni sebuah pikiran yang mencoba menginterupsi atas suatu hal yang berjalan secara statis, yang dalam hal politik dapat diartikan sebagai politik yang hanya diartikan sebagai penasbihan tentang pengetahuan akan adanya *the one* yang hanya berurusan dengan bagaimana mempertahankan kekuasaan dan pikiran tersebut menyusup dalam relasi politik sebagai urusan administrasi belaka tanpa adanya pikiran mengenai keadilan didalamnya. Bagi Badiou, keadilan dalam konteks politik hanya akan dapat diperoleh melalui sebuah prosedur kebenaran, dan disisi lain kebenaran juga merupakan suatu hal yang beriringan dengan datangnya sesuatu yang baru, bukan lagi terkandung pada repetisi nilai-nilai yang berjalan dalam suatu masyarakat.

Kedua, mengenai ruang kosong dalam masyarakat yang menjadi syarat bagi keberlangsungan politik. Ruang kosong adalah sesuatu faktisitas yang hadir dalam setiap situasi politik. Pengakuan akan adanya ruang kosong itulah yang menjadi dasar lain bagi politik untuk memperjuangkan sesuatu yang baru, karena

disisi lain justru prosedur *count as one* dari sebuah rezim menafikan ruang kosong tersebut. Semuanya telah didistribusikan dalam berbagai fungsi masyarakat, tanpa melihat adanya kemajemukan yang pada dasarnya “tidak dapat dikenali” dalam perhitungan tersebut.

Sehingga, politik dilihat Badiou sebagai sesuatu yang memperjuangkan agar adanya interupsi terhadap distribusi tersebut. Meminjam istilah dari Ranciere, *society* bukanlah kata yang tepat ataupun kata yang mampu menampung semangat politik, dikarenakan *society* hanyalah sebuah kondisi dimana distribusi akan berbagai fungsi hidup telah diatur sedemikian rupa oleh “kekuasaan”. *Society* hendaknya digantikan oleh kata yang lain yang lebih relevan dalam menghidupkan politik, yakni apa yang disebut sebagai *Community*. Sebuah kondisi dimana kemajemukan tumbuh subur dalam memproyeksikan identitas mereka masing-masing, tanpa harus dilabeli kembali dengan representasi dari sesuatu yang berada di luar diri mereka.

Ketiga, mengenai adanya infinitas dalam *society* juga menjadi landasan politik untuk dipikirkan “kembali”. Jika sebelumnya ruang kosong menjadi sesuatu yang selalu hadir dalam setiap *society* sebagaimana *null set* yang membangun setiap himpunan, maka konsep infinitas adalah suatu hal yang menjadi ciri khas dari kemajemukan. Kemajemukan selalu memperbaharui diri menjadi kemajemukan lainnya, bukan hanya karena kemajemukan natural, namun karena didalamnya juga terdapat sesuatu yang tidak dapat dilacak, dikenali, namun yang hanya dapat diakui sebagai sesuatu yang “akan” hadir sebagai sesuatu yang baru.

Dalam pandangan penulis, tiga hal diatas masih disandingkan dengan *society* karena politik pada kenyataannya harus memperjuangkan nilai-nilainya yang tergerus dalam *society*. Adapun konsep *Community* adalah konsep yang memang diinginkan sebagai hasil “akhir” dalam perjuangan tersebut, bukan datang begitu saja. Politik pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari situasi *society* itu sendiri.

Dari fakta itulah, transformasi menuju sebuah sesuatu yang baru, atau dalam hal politik berarti terbebasnya suatu komunitas dari rezim yang mengekang diri mereka sebelumnya adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui pikiran yang

sama. Pikiran yang sama bukan hanya menunjukkan adanya kolektifitas didalamnya, namun juga suatu pikiran yang hendak melahirkan tindakan untuk memungkinkan adanya semacam kejadian politik yang mampu mengubah kontingensi dari konservatisme tersebut,

Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai transformasi dalam konteks Badiou, maka konsep-konsep yang tidak dapat kita lepaskan adalah identifikasi mengenai *evental-site*, *fidelity subject*, dan pada akhirnya *event* sebagai suplemen akhir yang memecahkan kebuntuan politik.

Badiou menjelaskan kejadian politik tersebut melalui berbagai contoh yang terdapat dalam “sejarah” dimana konsep-konsep yang mendukung adanya sebuah transformasi tersebut dapat dilihat secara nyata. Peristiwa politik seperti Revolusi Perancis, Revolusi kebudayaan Cina menjadi contoh bagi Badiou tentang transformasi tersebut.

Namun dalam hal ini penulis mencoba memberikan contoh sendiri mengenai hal diatas, yakni jika kita telik sejarah bangsa Indonesia dari tahun 1900-1998, maka terdapat rangkaian dimana adanya transformasi dalam setiap peristiwa politik dalam rentang waktu tersebut. Tentu penulis tidak akan menjabarkan dengan rinci seperti apa peristiwa yang terjadi dalam setiap rangkaian tersebut namun apa yang terjadi pada tahun 1908, 1928, 1945, hingga 1998 adalah peristiwa-peristiwa “besar” yang menggambarkan sebuah situasi dimana politik menampakkan diri sebagai *the real politic*.

Peristiwa tersebut ditandai dengan adanya kesamaan pikiran yang dimiliki oleh sekelompok pemuda yang sejatinya ingin membebaskan diri dari belenggu stagnansi politik saat itu. Pikiran dari sekelompok pemuda tersebut adalah gambaran dari *evental site* yang gelisah hingga memberontak untuk keluar dari representasi *the one*. Dengan artian, *evental site* adalah pikiran yang memulai politik untuk bertransformasi pada sebuah situasi yang baru.

Hal ini juga pernah disinggung oleh Bagus Takwin dalam sebuah esainya yang berjudul “Badiou tentang politik”, didalamnya ia menjelaskan bahwa Antropolog Sylvain Lazarus jadi inspirator Badiou untuk memikirkan ulang politik dan mengembangkan *metapolitics*.

Melalui Lazarus, Badiou memahami politik sebagai nama, sebagai singularitas yang ada di luar kategori waktu. Politik dipahami Lazarus sebagai ‘pikiran nominal’, sebagai presentasi yang tak dapat direpresentasi. Politik selalu berurusan dengan pemikiran tentang bagian dalam dari pikiran, tentang pikiran sebagai dirinya sendiri; politik yang terlepas dari waktu. Ia mengambil tempatnya sendiri di sini dan kini, lepas dari alur sejarah, tampil sebagai keterputusan dengan masa lalu. Berbeda dari pikiran dalam pengetahuan tradisional sejak Hegel hingga filsafat politik kontemporer yang menempatkan sejarah sebagai syaratnya, Lazarus mengeksklusi sejarah. Badiou memahami politik sebagai kejadian (*l'événement; event*) yang memutus hubungan dengan sejarah, sebagai *singularity* (ketunggalan) baru yang menampilkan dirinya sendiri.

Evental site adalah bagian yang selama ini dianggap menjadi bagian dalam operasi *count as one*, namun pada dasarnya ia bukanlah bagian yang dapat dilabeli dengan operasi tersebut dikarenakan *evental site* adalah situasi dimana sebuah pikiran yang berpresentasi namun tidak dapat direpresentasi.

Selanjutnya, mengenai *fidelity subject* yang juga merupakan bagian dari proses transformasi tersebut, jika dikaitkan dengan contoh yang penulis ambil, maka yang menjadi *fidelity subject* tentunya adalah pemuda-pemuda yang bersedia akan ide mengenai perubahan tersebut. Politik menjadi sesuatu yang dapat dikenali dengan kejadian politik, karena didalamnya kita selalu mudah untuk mengidentifikasi subjek-subjek yang bersedia tersebut. *Fidelity subject* adalah wujud dari pikiran yang berbeda, dan dengan kesetiaan tersebut mereka mampu menerobos pagar-pagar yang selama ini dibangun oleh *the one*. Pada poin ini penulis berpendapat bahwa kesetiaan bukan mengakhiri lain dari sebuah pikiran, bukan juga mengakhiri relasi kita tentang yang lain, namun justru menunjukkan sebuah keinginan untuk memproduksi sesuatu yang baru melalui perbincangan atas dasar *pikiran kita* yang membuat kita juga “patuh” padanya, beserta orang-orang yang juga kita setia padanya sebagai ikatan akan pikiran yang sama tersebut.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, konsep *fidelity* atau kesetiaan adalah suatu konsep yang membedakan politik dari hal lainnya. Kesetiaan adalah satu-satunya bagian dari material intervensi yang berkaitan erat

dengan sebuah konsistensi dalam perjalanan intervensi itu sendiri, sementara konsep lainnya justru berada dalam koridor inkonsistensi.

Konsistensi tersebut ditunjukkan dengan adanya sifat evaluatif dalam kesetiaan itu sendiri. Seperti yang ditekanan oleh Badiou (2005) bahwa fungsi kesetiaan adalah “*to evaluate dependency of any particular existing multiple with respect to the event*”. (p. 234)

Selanjutnya, Badiou (2005) juga menjelaskan strategisnya fungsi kesetiaan ditunjukkan melalui ciri khas yang terdapat dalam konsep kesetiaan itu sendiri. Hal pertama yang menjadi ciri tersebut adalah kesetiaan bersifat partikular, ia terlokalisir dalam kerangka suatu himpunan, namun menunggu sampai adanya suatu peristiwa untuk kemudian bergerak menjadi sebuah universalitas. Kedua, kesetiaan bukanlah entitas dalam sebuah situasi, namun kesetiaan adalah semacam operasi dalam situasi. Operasi tersebut mengindikasikan adanya dinamika mental sebuah kesetiaan, ia bukanlah sebuah entitas yang berdiam dalam situasi, namun konsistensi yang ia tunjukkan justru berupaya untuk menghasilkan inkonsistensi terhadap situasi yang tengah berjalan. Ketiga, Badiou menyebutkan bahwa kesetiaan memiliki semacam pola yang bersifat *institusional* dikarenakan adanya upaya untuk merepresentasikan kejamakan yang sebelumnya telah dipilih dalam sebuah situasi. Terakhir, kesetiaan juga memiliki pola yang bersifat deduktif dalam relasinya dengan sebuah peristiwa. Dengan artian, kesetiaan yang sebelumnya memang bersifat *konsisten* juga berproses secara deduktif hingga konsekuensi dari peristiwa yang dihasilkan. (p. 233)

Dari ciri khas yang terdapat dalam kesetiaan tersebut dapat dilihat bahwa Badiou pada akhirnya ingin menunjukkan sebuah tesis bahwa proyek politik melalui sebuah intervensi sangat bertumpu pada subjek yang bersetia, subjek yang *konsisten* akan pilihannya dan terus menunggu momen peristiwa yang menjadi titik untuk keluar dari kesatuan yang selama ini berjalan. Bagi Badiou, kesetiaan menghasilkan semacam kategorisasi dalam konsep bagian sebuah kehidupan bersama. *Mereka yang mampu mengambil bagian dalam sebuah situasi pada akhirnya adalah mereka yang membuat peristiwa tersebut terjadi!*.

Pembacaan terhadap konsep kesetiaan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai peristiwa politik. Berbeda dengan material intervensi lainnya yang sulit

diidentifikasi secara riil, maka kesetiaan justru menampakkan dirinya baik sebelum maupun sesudah peristiwa terjadi. Dengan kata lain, kebaruan dalam politik secara keseluruhan bertahan pada konsistensi kesetiaan subjek yang memperjuangkan ke-kita-annya tersebut.

Ketiga mengenai peristiwa (*event*), dalam pembahasan mengenai ontologi dari Badiou, kita mengetahui bahwa *event* adalah semacam suplemen yang mengafirmasi pikiran berbeda dalam sebuah *society*. Jika kembali kita kaitkan dengan pendasaran teori himpunan, maka apa yang dimaksud oleh Badiou sebagai peristiwa adalah sebuah suplemen yang memberntuk *generic set* yang telah bersiap untuk dikenakan dengan energi *forcing*. Begitu juga dalam politik, peristiwa adalah sebuah sentuhan yang membuat sebuah *society* menjadi retak oleh gagasan yang bersikeras untuk keluar dari sebuah himpunan politik.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai konsep *evental site*, didapat sebuah kesimpulan bahwa *evental site* adalah sesuatu materi yang memungkinkan suatu peristiwa namun tidak memproduksi peristiwa itu sendiri. Sehingga jika kita berupaya untuk mendefinisikan konsep peristiwa, maka kita juga tidak akan lepas dari paradoks yang mengenai “Ada” yang menjadi ranah bagi peristiwa itu sendiri. Dari paradoks Russel kita tahu bahwa tidak ada sebuah himpunan yang merupakan elemen dari dirinya sendiri. Namun peristiwa justru hadir sebagai sesuatu yang sekaligus menjadi bagian dirinya sendiri. Ini tidak lepas dari kaitannya dengan konsep intervensi itu sendiri. Dengan artian, ketika sebuah peristiwa memecah sebuah kestabilan politik, maka dalam momen tersebut juga diperlukan semacam intervensi akan penamaan peristiwa tersebut dalam rangka mengafirmasi kebaruan yang dihasilkan. Namun dikarenakan keterbatasan bahasa yang selalu mengiringi setiap peristiwa, maka disaat itu juga paradoks tentang situasi hadir dalam merepresentasikan peristiwa yang tengah terjadi.

Dalam pandangan Badiou (2005), peristiwa adalah sebuah kejamakan yang elemennya merupakan, di suatu sisi seluruh kejamakan yang menjadi elemen dari situs peristiwa, dan disisi lain peristiwa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui contoh yang terjadi pada reformasi tahun 1998 di Indonesia. Dalam peristiwa tersebut terdapat berbagai elemen yang mempresentasikan peristiwa tersebut, seperti pergerakan mahasiswa, krisis ekonomi, jatuhnya Soeharto,

penembakan mahasiswa oleh aparat, dan sekaligus reformasi itu sendiri. Dengan kata lain, peristiwa hadir sebagai sesuatu yang mempresentasikan seluruh material yang terkandung didalamnya sekaligus dirinya sendiri, atau dalam notasi himpunan apa yang ditulis sebagai $(x \in x)$.

Jika kita kembali pada tesis matematika sebagai ontologi, maka tentu didapat sebuah pelanggaran atas ontologi tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa ontologi tidak pernah mengamini konsep paradoks yang dihadirkan oleh peristiwa, khususnya pada akisoma fondasi yang secara jelas melarang adanya himpunan yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. *If x is a set, there is an $a \in x$ such that $a \cap x = \emptyset$.* Dengan artian, jika x adalah sebuah himpunan, maka terdapat elemen a dari x sehingga tidak ada himpunan yang menjadi anggota dari x dan a .

Ontologi jelas melarang hadirnya peristiwa, namun bagi Badiou, hal tersebut justru berada dalam koridor struktural, sementara peristiwa kembali harus ditekankan bukanlah sesuatu yang hadir dalam konteks sebuah pengetahuan yang *struktural*. Oleh karena itu, disinilah letak dari modifikasi Badiou atas konsep *forcing* yang adopsi untuk kemudian menjelaskan fungsi intervensi didalam sebuah peristiwa. Hal ini dapat dijelaskan lagi melalui contoh sebelumnya yakni reformasi 1998 di Indonesia.

Dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, *event* yang menandai sebuah pergerakan politik pada saat itu memang tidak dapat diprediksi waktu dan tempat kejadiannya, namun satu hal yang pasti adalah intervensi hadir sebagai sebuah pikiran yang mencoba membuat *event* tersebut hadir secara efektif dalam sebagai afirmasi atas pergerakan tersebut. Dalam hal ini, ini kata reformasi mungkin adalah kata yang menjadi intervensi atas *event* seperti apa yang tengah terjadi saat itu.

Kebenaran yang dicapai melalui sebuah proses intervensi politik adalah sesuatu yang selalu bersifat *finite*, atau dalam konteks matematika intervensi berada dalam sebuah kerangka harga mutlak tentang sesuatu nilai yang diperkerjakan, yakni $|x|$. Dengan artian, kebenaran disusun atas berbagai nilai *positif* atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga dengan adanya keberhingan dari kebenaran itulah terdapat kemungkinan bahwa yang kolektif telah mencapai

suatu titik awal kebaruan, sebuah titik dimana mereka semua menyadari bahwa mereka telah keluar dari rezim yang selama ini mengekang mereka dalam satu kesatuan. dalam hal ini, konsep *forcing* yang diadopsi oleh Badiou menjadi dapat diartikan sebagai sebuah *pemaksaan* untuk mentransformasikan yang tak terpilah menjadi yang dikenali dalam kerangka kebenaran.

Selain itu, dalam konteks contoh yang diambil, kata reformasi memang bukanlah sebuah kata yang baru dalam pikiran manusia, namun reformasi pada saat itu menjadi baru karena ia hadir sebagai sebuah nama atas identitas yang baru beserta elemen-elemen yang termuat didalamnya. Reformasi hanyalah sebuah kata yang dipinjam agar sejenak politik berhadapan dengan sebuah limitasi atas infinitas. Limitasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran mengenai kebenaran yang ingin ditunjukkan atas interupsi yang tengah dilakukan.

Limitasi tentunya bukan menafikan adanya infinitas yang sebelumnya diakui dalam pikiran yang sama, namun dalam pandangan Badiou *event* adalah sebuah awal dari kemajemukan yang baru, sebuah awal yang tentunya masih mengindikasikan ketakberhinggaan dalam politik itu sendiri. Begitu juga dengan intervensi atas nama yang diberikan pada kejadian tersebut, bukan sebuah finalisasi politik, namun intervensi hanyalah sebuah struktur yang mencoba memformulasi kembali ide tentang kebenaran dalam politik, yang dalam hal ini berarti ide mengenai keadilan.

Pada poin ini, didapat sebuah hal yang membedakan politik dalam diskursus yang ditunjukkan oleh Badiou. Pikiran politik pada akhirnya memiliki sebuah muatan penting yang didistribusikan pada yang kolektif, sebuah pikiran kebenaran yang bermuatan tentang ide keadilan dimana menurut Badiou hal inilah yang sudah dinafikan oleh sebagian besar kerja politik.

Pikiran politik, kebenaran, dan keadilan memang menjadi pembeda pembicaraan kita mengenai filsafat Badiou. Ketiga hal tersebut menjadi penting karena dalam ketiga hal itulah politik masih mungkin disebut sebagai politik, dan masih mungkin untuk selalu diurai ditengah infinitas situasi.

Oleh karena itu, penulis mencoba merangkai ketiga hal tersebut dalam penjelasan berikutnya. Pembahasan mengenai intervensi akan transformasi kepada

sesuatu yang baru bukanlah akhir dari perbincangan kita tentang Badiou, namun terdapat bagian penting lainnya, yang penulis akan coba kaitkan dengan dukungan teorema limit dalam matematika yang menghasilkan formula atas kebenaran yang memuat keadilan didalam politik.



BAB 4 KEADILAN DAN LIMITASI

4.1 Politik dan Keadilan

Pembahasan pada bagian ini dalam pandangan penulis dapat dikatakan sebagai jawaban Badiou atas permasalahan yang masih disisakan dalam konsep intervensi yang menjadi fokus pembahasan sebelumnya. Dengan artian, intervensi hanyalah semacam prosedur yang berusaha untuk menghadirkan kebenaran melalui sebuah *event* di tengah sebuah situasi yang selama ini mengekang keberagaman. Namun tentunya politik tidak hanya berhenti pada terciptanya sesuatu yang baru sebagai sesuatu yang menginterupsi *common measure*, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah konten semacam apa yang terdapat dalam kebenaran tersebut.

Hadirnya kebenaran melalui suatu peristiwa tentu tidak menyelesaikan persoalan. Keberadaan kebenaran itu sendiri bermasalah karena tidak adanya semacam panduan yang pasti didalamnya. Sebabnya karena peristiwa yang emansipatoris selalu menampilkan kontradiksi dari situasi. Peristiwa mengartikulasikan kekosongan sebagai sesuatu yang tidak terhitung dalam dalam situasi, yang tidak terpahami dalam logika dominan yang hendak mempertahankan stabilitas situasi. (Suryajaya, 2011, p.202)

Bagi Badiou, permasalahan tersebut dijawab dengan penegasan yang cukup berbeda, dalam hal ini, Badiou menegaskan bahwa kebenaran dalam politik adalah keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*), kedua hal tersebut adalah sesuatu yang mutlak berada dalam sebuah perjuangan politik, tidak ada konsep lain yang dapat menggantikannya dalam sebuah pikiran politik.

Tentu pandangan Badiou menghasilkan pertanyaan yang mungkin menjadi argumen yang mematahkan pemikiran Badiou, yakni bagaimana mungkin menjelaskan politik sebagai pikiran yang orisinal sementara didalamnya juga terdapat kontradiktif yakni perihal etika yang menjadi bagian mendasar pembicaraan politik.

Memang antara politik dan etika adalah sesuatu yang berbeda, akan menjadi sebuah ambiguitas ketika membicarakan dua hal tersebut dalam sebuah

payung konsep yang sama. Namun sebelum menjelaskan hal tersebut, penulis akan kembali menjelaskan kerangka berpikir Badiou mengenai konsep keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*) dalam kebenaran politik.

Pertama, mengenai keadilan, Badiou menjelaskan bahwa Badiou (2003) mengistilahkan keadilan sebagai “...*the name by which philosophy designate the possible truth of political orientation.*” (p. 69-70). Keadilan merupakan kata yang diambil dari filsafat. Tetapi, dalam filsafat pun kata ini bersyarat. Dengan artian, keadilan hanya dapat dipakai pada konteks dimana manusia hidup bersama dalam suatu situasi, dan bagi Badiou situasi tersebut tidak lain adalah situasi politik itu sendiri.

Keadilan adalah sesuatu nama dalam kosakata filsafat yang menunjukkan baha pada dasarnya filsafat bekerja dalam sebuah pikiran (*thought*), sehingga hadirnya keadilan adalah sebuah tanda dimana munculnya kebenaran yang menjadi orientasi filsafat, bukan justru menjadi bagian dari sebuah perencanaan politik. Hal ini menjadi penting dikarenakan bagi Badiou, politik saat ini bukan lagi politik yang berelasi dengan sebuah pikiran, namun hanya sebuah wujud dari adanya kepentingan-kepentingan dari berbagai elemen tanpa adanya unsur pemikiran didalamnya. hasilnya, politik saat ini juga tidak berurusan dengan kebenaran, yang tentunya juga sama sekali tidak menyinggung keadilan. Politik saat ini meminjam istilah Goenawan Moehammad adalah komedi putar yang ditunggangi oleh kelompok yang sama. Politik menjadi hal yang semakin jauh dari filsafat karena ia hanya berputar pada lintasan yang sama, dan hanya berusaha untuk mempertahankan lintasan tersebut.

Dengan fakta tersebut, keadilan bagi Badiou hanya dapat dikenali pada situasi tertentu, bukan pada terciptanya sebuah konsistensi sebuah masyarakat atau pada dituasi dimana berlangsungnya ketertiban sosial. Keadilan justru sebaliknya, berelasi erat pada kondisi dimana inkonsistensi terjadi pada suatu disintegrasi tatanan sosial. Badiou (2003) menyatakan bahwa “*we have too often wished that justice find the consistency of the social tie, while it can only name the most extreme moment o inconsistency*”. (p. 77).

Disisi lain, keadilan juga tidak dapat dilepaskan dari konsep lain yakni konsep kesetaraan (*equality*). Dalam hal ini, Badiou mencoba melihat sejenak

pada sejarah mengenai politik sebagai pikiran yang mengusung ide tentang keadilan didalamnya. adanya historisitas tersebut, sebagai akibat dari absennya politik yang hadir sebagai pikiran saat ini. Badiou mencontohkan hal tersebut pada situasi yang terdapat pada revolusi Perancis dan Revolusi Kebudayaan Cina.

Di bulan April 1794, Saint-Just mendefinisikan ‘kesadaran publik’, “*May you have a public consciousness, for all hearts are equal as to sentiment of good and bad, and this consciousness is made up of the tendency of the people toward the general good.*”

Dari Revolusi Kebudayaan Cina, Badiou mengambil petikan pidato Mao Tse-tung, “*Let the masses educate themselves in this great revolutionary movement, let them determine themselves the distinction between what is just and what is not.*”

Kedua peristiwa tersebut bagi Badiou memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai relasi mengenai politik, kebenaran, dan kesetaraan. Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan melalui contoh yang diberikan Badiou. Diantaranya adalah, peristiwa tersebut menjelaskan adanya politik sebagai pikiran, bukan politik yang hadir sebagai kepetingan yang menafikan adanya pikiran didalamnya. apa yang terdapat dalam semangat kedua revolusi tersebut bagi Badiou adalah semangat dimana orientasi politik yang bersandar pada ide mengenai keadilan, dan aktor politik yang terdapat didalamnya adalah “representasi” dari sebuah tanda mengenai kesetaraan yang menjadi patokan pikiran politik tersebut.

Selanjutnya, peristiwa tersebut juga menggambarkan orientasi politik bersandar pada prinsip egaliter yang didalamnya keberagaman kolektivitas selalu diberi ruang untuk memikirkan apa yang adil dan sebaliknya apa yang tidak adil dalam konteks kolektivitas itu sendiri.

Disisi lain, apa yang dimaksud oleh Badiou sebagai kesetaraan (*equality*) bukanlah sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang objektif seperti status sosial, penghasilan, fungsi atau kontrak sosial yang menempatkan orang-orang yang terlibat sebagai pihak-pihak yang setara.

Jika dihubungkan dengan peristiwa diatas kembali, maka kesetaraan menurut Badiou bersifat subjektif, kesetaraan dengan perhatian terhadap kesadaran publik untuk Saint-Just atau terhadap pergerakan massa pada ucapan

Mao. Dengan kata lain kesetaraan adalah *maxim* politik, sebuah preskripsi, yang tentunya berkaitan erat dengan orientasi sebuah pikiran dan tindakan politik.

Kesetaraan dalam politik bukanlah sesuatu yang direncanakan, dan juga bukan merupakan sebuah program sosial dalam suatu masyarakat, melainkan “...*what we declare under fire of event, here and now, as what it is, and not as what should be.*” (Badiou, 2003, p. 72)

Disisi lain, dikarenakan kesetaraan dan keadilan adalah konsep yang berelasi satu sama lainnya, maka keadilan dalam hal ini juga tidak dapat ditemukan ataupun dijadikan sebagai program sosial. Bagi Badiou (2003) Keadilan adalah “... *the qualification of an egalitarian political orientation in act.*” (p. 72)

Selanjutnya, pemahaman akan keadilan dan kesetaraan dalam konteks pemikiran Badiou dapat ditegaskan pada pemahaman kita mengenai konsep presentasi dan representasi. Dalam hal ini, mengapa keadilan tidak dapat didefinisikan ataupun diletakkan dalam kerangka Negara dapat dijawab dengan pernyataan bahwa keadilan adalah presentasi yang tidak dapat direpresentasi. Ia hadir tanpa harus dilabeli kembali oleh kepentingan diluar orientasi presentasinya, sebuah hal yang tentunya selalu dilakukan dalam konsep *the state* melalui operasi *count as one*.

Sehingga, menjadi jelas bahwa pembicaraan mengenai politik bagi Badiou adalah pembicaraan mengenai keadilan. Jika dalam sebuah pikiran politik tidak terdapat ide keadilan, maka dapat dipastikan apa yang sedang dipikirkan tersebut bukanlah politik. Sebuah *maxim* yang tentunya tidak dapat ditawarkan dalam kerangka sebuah percakapan filsafat.

4.2 Dimensi Etis dalam Politik

Penjelasan Badiou mengenai keadilan dan kesetaraan dalam kerangka politik tentunya menyisakan berbagai pertanyaan mendasar, salah satunya adalah bagaimana mungkin terdapat sebuah loncatan berpikir dari sesuatu yang politik pada sesuatu yang bersifat etis. Apakah filsafat politik dari Badiou masih dapat dikategorikan sebagai “filsafat politik” sementara didalamnya juga terdapat perhatian yang besar kepada etika.

Bagi penulis, hal pertama yang mungkin dapat menerangkan arah pembicaraan ini adalah dengan mencari pikiran Badiou yang meletakkan sebuah “dasar” bagi terciptanya kemungkinan etis bersandar pada yang pikiran politik, atau mungkin sebaliknya, politik yang bersandar pada etika. Jika kita kembali sejenak pada pembahasan Badiou mengenai kesetaraan, maka didalamnya terdapat sebuah penegasan bahwa kesetaraan memang tidak hadir dalam “realitas” namun justru menjadi aksioma dari pikiran yang berujung kepada tindakan.

Dari penegasan tersebut, kita juga dapat membacanya bahwa Badiou mengisyaratkan adanya *an etchical maxim*. Dengan artian, bagi Badiou adalah sebuah hal yang tidak mungkin ketika membicarakan *real politic* tanpa membicarakan etika juga dalam kerangka *the real*. Dalam momen ini, penulis juga mengakui ada semacam ambiguitas yang ditemui dalam jalan pikiran tersebut. Badiou bukan hanya menyandingkan politik bersamaan dengan etika, namun justru menjadikannya sebuah “kemutlakan” dengan adanya penegasan tersebut.

Terdapat berbagai referensi yang dapat menjembatani permasalahan diatas. Salah satunya adalah apa yang dijelaskan oleh Marchart (2007) bahwa dalam permasalahan etika, Badiou pada dasarnya tidak menganggap adanya etika yang berdiri secara mandiri, namun berbicara etika hanya mungkin apabila disandingkan dengan konsep lainnya, seperti etika politik, etika seni, ataupun berbagai hal lainnya. Namun jika ditelik lebih lanjut, sistem filsafat Badiou “berujung” kepada suatu muara, dan muara tersebut adalah etika.

Dalam pandangan penulis, hal diatas dapat disederhanakan melalui sebuah pikiran dimana etika wujud dari pikiran politik itu sendiri. Etika adalah tindakan, dimana ia didasari pada pikiran (*thought*) akan kebenaran yang dimulai dari kerangka politik. Pikiran etika yang ditemukan dalam penjelasan Badiou adalah etika tentang kebenaran (*ethics of truth*) dimana juga berelasi dengan konsep *the real*. Bagi Badiou, etika kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat dimediasi, kita hanya dapat menemukannya, dan kemungkinan tersebut juga hanya dapat didukung oleh faktor lainnya, yakni konsep *fidelity*.

Sehingga menjadi jelas bawa semangat Badiou mengenai etika pada tentu berbeda dengan problem etika dari pemikir kontemporer lainnya. Etika dalam

politik berarti subjek yang bersetia terhadap apa yang telah ditemukan dalam intervensi, kesetiaan tersebut tidak pernah bersifat final, ia akan terus bertahan dalam keberagaman tersebut dimana didalamnya akan selalu ada kemungkinan terciptanya sesuatu yang baru, kebenaran yang baru, bukan bertahan pada pengetahuan tentang apa yang telah selama ini ditemukan.

Bagi Badiou, politik pada akhirnya bukan hanya hubungan vertikal antara subjek dengan penemuannya terhadap kebenaran melalui sebuah peristiwa, namun politik seharusnya juga berelasi dengan sesuatu yang bersifat horizontal, yakni permasalahan yang terdapat setelah adanya *event* itu sendiri, politik hendaknya juga memberi fasilitas dalam relasi keberagaman itu sendiri.

Pandangan diatas dapat direlasikan dengan konsep politik bagi Badiou yang tidak dapat dilekatkan pada semua hal. Politik hanya terjadi pada momen tertentu, dan mungkin sangat jarang terjadi pada sejarah manusia. Lantas bagaimana politik yang terjadi pada keseharian?, Badiou memang menganggap hal tersebut bukanlah sebuah politik, karena tidak ada unsur pikiran didalamnya, yang ada hanya kepentingan berbagai kelompok. Namun tampaknya, Badiou “terpaksa” memberi perhatiannya sejenak terhadap praktek politik semacam itu. Perhatian tersebut ditandai dengan adanya etika yang bekerja dalam politik.

Sejauh pemahaman penulis, adanya perhatian tersebut adalah sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai situasi praktek politik yang berpusar pada kekuasaan dan rezim yang menafikan pikiran. Namun disisi lain, perhatian tersebut bukan justru menyingkirkan originalitas politik yang diyakani oleh Badiou, akan tetapi lebih kepada tesis tentang politik yang pada akhirnya tidak dapat dilekatkan pada semua hal, sehingga etika adalah pintu masuk Badiou dalam mengkritik praktek realitas politik.

Dengan kata lain, dalam pikiran Badiou etika memberikan memberi jalan tentang adanya konsep *real* dan *reality*. Dua kata tersebut tentunya berada dalam level berbeda, sehingga jika kita tarik penjelasan Badiou mengenai etika dan relasinya dengan politik maka pada akhirnya terdapat sebuah fakta bahwa *there is no politic of the real*, yang ada justru *ethic of the real*.

Politik direduksi kepada etika dalam rangka menghindarkan diskursus akan politik pada berbagai lingkup permasalahan, namun kembali pada pikiran awal

Badiou, yakni diperlukan hal lain yang menjaga originalitas tesis tersebut, dan etika politik (*ethic of politic*) adalah hal yang paling mungkin sebagai konsep yang mampu menghasilkan turunan yang sebenarnya menjadi orientasi pikiran politik

Pandangan Badiou mengenai etika dan politik tentunya bernuansa dualistik yang mungkin juga pada beberapa momen menjadi sebuah paradoks. Namun apa yang telah dijelaskan oleh Badiou adalah semacam penegasan tentang perbedaan *politic of truth* dan *state*. Badiou tentu tidak ingin politik menjadi hal yang pada akhirnya bekerja “di luar” ontologi yang telah dibangun sebelumnya, namun dimensi tantangan yang terus berkembang membuat dalam satu titik, harus terdapat semacam pemberhentian sementara ontologi tersebut. Pemberhentian tersebut tentu bukanlah indikasi tentang ketidakmampuan politik dalam menjawab realitas yang dihadapi, namun lebih kepada usaha untuk mendifrensiasi ontologi dalam rangka terus mencari turunan yang memang pantas menjadi pikiran politik itu sendiri.

Oleh karena itu, bagi penulis kata “pemberhentian” sementara ontologi tersebut sebangun dengan konsep limitasi yang hendak penulis jelaskan di bagian berikutnya, sebuah penjelasan yang mungkin dapat mendukung pemikiran Badiou tentang relasi keadilan dalam pikiran politik.

4.3 Relasi Limit dan Keadilan

Dalam penjelasan ini, penulis mencoba mengambil teori dari matematika untuk menegaskan tesis Badiou mengenai konsep keadilan yang terdapat dalam setiap pikiran politik. Hal ini berkaitan erat dengan tesis Badiou sebelumnya mengenai matematika sebagai ontologi. Penjelasan mengenai ontologi tersebut bukan hanya berkisar pada persoalan infinitas yang terdapat dalam himpunan namun tantangan selanjutnya dari pikiran tersebut adalah mengenai konten yang seharusnya terdapat dalam setiap perubahan yang telah dicapai.

Pikiran tersebut tentunya mengindikasikan bahwa dalam hal politik, Badiou bukan hanya bermain pada teori model (teori himpunan), namun juga berupaya untuk membuat perbedaan dengan sejenak memerhatikan konten dari model tersebut. Hal ini juga pernah disinggung dalam sebuah pernyataan

mengenai tesis matematika Badiou, yakni : “*The Challenge for thought will not be of defining limits, but rather that of defining the successor*”. (Gillespie, 2008, p. 22).

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengurai sebuah pikiran melalui teori limit dalam matematika, sebagai jawaban atas tantangan dalam menemukan suksesor dari pikiran politik, yakni konsep keadilan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga yang yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana menghasilkan tesis yang mampu menerangkan limit sebagai pintu masuk untuk menegaskan keadilan sebagai bagian mutlak dalam sebuah pikiran politik itu sendiri.

Hal pertama yang perlu dipahami adalah mengenai konsep limit itu sendiri. Dalam teori matematika, limit adalah konsep yang digunakan untuk menghidarkan suatu fungsi dari hasil yang tak hingga. Limit adalah upaya untuk membuat suatu fungsi matematika mempunyai suksesor yang *real*, atau sebuah turunan yang berhingga. Namun yang juga perlu dicatat adalah dalam rangka menghindari hasil yang tak tentu tersebut, limit juga didampingi oleh sebuah nilai yang hasilnya bukanlah sebuah kepastian tentang nilai yang ingin dihasilkan, namun lebih kepada sebuah hasil yang mendekati nilai tersebut.

Tentu dalam konteks matematika, limit adalah suatu bagian penting yang cukup kompleks pembahasannya. Meskipun termasuk secara implisit dalam pengembangan kalkulus pada abad ke-17 dan 18, gagasan modern limit fungsi, baru dibahas oleh Bolzano, yang pada 1817, memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon-delta. Namun karyanya tidak diketahui semasa hidupnya.

Cauchy membahas limit dalam karyanya *Cours d'analyse* (1821) dan tampaknya telah menyatakan intisari gagasan tersebut, tapi tidak secara sistematis. Presentasi yang ketat terhadap khalayak ramai pertama kali diajukan oleh Weirstrass pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an, dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkatan **lim** dengan anak panah diperkenalkan oleh Hardy dalam bukunya *A Course of Pure Mathematics* pada tahun 1908.

Dalam konteks ini, limit dipresentasikan sebagai sebuah substraksi pada dua hal, yakni konsep *limit of sequence* dan *limit of function*. Batasan terhadap kedua konsep tersebut tentunya berelasi dengan konteks permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Dengan artian, ketika kita sebelumnya menjelaskan intervensi dari konsep *forcing*, maka diperlukan sebuah koherensi antara *forcing* dengan limit. Limit bukan hanya sekedar konsep yang hadir begitu saja dalam menegaskan fungsi intervensi, namun limit adalah konsep yang secara matematis memang berelasi erat dengan teori model itu sendiri. Sehingga, jika kita berbicara mengenai teori model, maka pembicaraan mengenai limit juga menjadi konsep yang tidak asing lagi didalamnya. limit hadir sebagai fungsi diferensial dalam teori model itu sendiri.

Selanjutnya, penulis mencoba mengambil gambaran mengenai limit melalui penjelasan sederhana matematis. Penjelasan ini tidak lain bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana limit bekerja dalam sebuah fungsi matematika.

Terdapat sebuah fungsi matematika (fungsi 4.3.1) :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3}$$

F(x) terdefinisi bagi setiap x kecuali nilai $x = 3$, karena bila $x = 3$ maka $f(3)$ menjadi $f(3) = \frac{0}{0}$ (tak terdefinisi).

Namun jika kita uraikan fungsi tersebut pada kisaran nilai $x = 3$ dalam rangka mencari solusi fungsi tersebut, maka didapat sebuah jalan pikiran dibawah ini :

x	2	2.5	2.75	2.95	2.99	3	3.01	3.25	3.5
f(x)	7	7.5	7.75	7.95	7.99	?	8.01	8.025	8.5

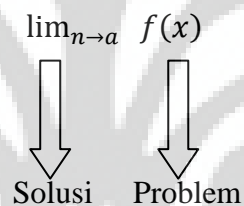
Sehingga dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bila x mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan, maka nilai f(x) mendekati 8. Kondisi ini umumnya

dinyatakan dengan “jika x mendekati 3 maka limit $f(x)$ adalah 8 dan ditulis sebagai :

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 15}{x - 3} = 8$$

Dari penjelasan sederhana diatas dapat diambil sebuah pengertian yang penting yakni limit hadir sebagai suatu metode untuk menguraian sebuah solusi atas sebuah permasalahan (fungsi). Solusi tersebut diberikan dalam rangka menghindarkan fungsi dari hasil yang “tidak tentu”, sehingga solusi yang diberikan bukanlah suatu kepastian akan sebuah nilai, namun sebuah solusi yang bersifat mendekati permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, secara umum teori mengenai limit tersebut dapat kita gambarkan secara umum melalui model berikut :



Tentu dalam konteks matematika, limit memiliki beragam fungsi lainnya beserta beragam aksioma yang terdapat dalam “sistem” limit. Namun apa yang ingin penulis kemukakan disini adalah bagaimana limit dapat dibawa dalam konteks filsafat politik yang menjadi tema pokok pada tulisan ini, lebih khususnya bagaimana limit menjadi mungkin untuk menjelaskan problem keadilan.

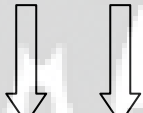
Sehingga, bagi penulis, fungsi limit secara mendasar adalah semacam substraksi yang mampu menjelaskan tujuan tulisan ini. Dengan artian, limit dapat ditarik pada wilayah sosial, sama halnya ketika teori himpunan menjadi kerangka dalam ontologi bagi Badiou.

Untuk menjelaskan hal tersebut, kita perlu kembali pada penjelasan mengenai ontologi berdasarkan teori himpunan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, intervensi pada akhirnya menghasilkan himpunan yang baru dengan identitas yang baru. Namun dalam kenyataan politik, kita tidak hanya berelasi

dengan permasalahan bagaimana menemukan kebenaran melalui sebuah peristiwa, namun setelah adanya himpunan baru tersebut, kita juga dihadapkan pada persoalan mengenai konten dari himpunan tersebut.

Konten tersebut dapat diartikan sebagai turunan yang menjadi identitas politik yang hendaknya selalu diselanggrakan oleh himpunan tersebut. Hal ini tentunya terkait dengan penegasan Badiou mengenai harus ada sebuah pembeda antara *politic of truth* dengan *state* ("*politic*" of *state*). *New set* sebagai hasil intervensi hendaknya mampu mengisi *set* tersebut dengan terselanggaranya pikiran politik didalamnya, namun bukan berarti menutup kemungkinan potensi dari *set-set* lainnya. Singkatnya, meminjam istilah dari Bagus Takwin, politik adalah kemungkinan untuk mencapai "KITA", dan keadilan adalah pikiran yang mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman untuk memberi makna pada ke-kita-an tersebut agar tidak kembali terjebak pada pikiran politik negara.

Sehingga, pada poin ini kita mampu masuk pada pemodelan permasalahan berdasarkan limit,

$$\lim_{n \rightarrow a} f(x)$$


Solusi Problem

$f(x)$ adalah model dari sebuah fungsi, himpunan, atau sebuah komunitas baru yang terlahir dalam sebuah prosedur kebenaran, namun tentunya dalam himpunan tersebut beragam problem akan muncul, terutama dalam bagaimana menyelenggarakan sebuah kehidupan politik secara horizontal, kehidupan politik yang memfasilitasi *fidelity* yang telah menjadi modal besar bagi komunitas tersebut.

Disinilah bagi penulis konsep limit dapat bekerja untuk menghadirkan fasilitas tersebut. Perlu ditegaskan kembali, keadilan bukanlah hal yang hendak dicapai, namun justru keadilan adalah pikiran yang hadir sebelum tindakan. Keadilan bukanlah keadaan final, namun justru bekerja dalam tatanan *real*, sama halnya dengan pernyataan mengenai *ethic of real*.

Limit hadir sebagai penegasan konsep keadilan yang bekerja atas sebuah permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keberagaman tersebut. Bekerjanya konsep limit bukan menafikan adanya infinitas, limit hanyalah sebuah metode dimana kehidupan bersama bukan hanya persoalan mencari sesuatu yang baru, mencari *event*, atau berkonfrontasi dengan negara. Penghindaran akan adanya hasil “tidak tentu” dalam limit adalah sebuah jalan agar kehidupan bersama tersebut dapat dipahami secara efektif dalam keseharian, dan yang paling penting adalah melalui limit, keadilan bekerja bukan sebagai sebuah solusi mutlak atas permasalahan yang dihadapi, namun menghadirkan sebuah solusi yang mendekati permasalahan tersebut.

Limit menegaskan dalam sebuah kehidupan bersama, sistem yang dibangun untuk mengatasi segala problem tidak akan pernah menjadi solusi final, justru yang ada hanyalah formula yang mampu mendekati permasalahan tersebut. Memang dalam limit sendiri, dijumpai beberapa fungsi yang unik, dimana fungsi dapat diselesaikan melalui sebuah nilai, dengan tidak menghasilkan nilai yang tidak tentu. Sebagai contoh, fungsi berikut (4.3.2)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x^2 - 4}{5x - 6} \right) = 1$$

Fungsi diatas dapat diberlakukan dengan prosedur untuk secara langsung memberikan nilai x pada fungsi $f(x)$ sebagai solusi atas fungsi tersebut, dengan hasil yang tentunya tidak berujung kepada $\frac{0}{0}$.

Namun perlu digaris bawahi fungsi diatas sangat jarang ditemui dalam konteks teorema limit, justru yang banyak ditemui adalah fungsi yang kompleks dengan pendekatan yang tentunya juga tidak dapat langsung melalui jalan pikiran diatas.

Pada permasalahan politik, fungsi (4.3.2) adalah gambaran dimana Negara menjalankan politik sebagai manajemen administrasi pada sebuah sistem. Politik hanyalah sebatas eksekusi berbagai aturan tanpa adanya pikiran mengenai keadilan didalamnya. Sehingga, pemaksaan berbagai nilai tersebut pada akhirnya banyak menghasilkan nilai yang tidak tentu dikarenakan banyak fungsi (problem)

yang sebenarnya tidak dapat ditemukan solusinya melalui eksekusi sistem, lebih lanjut hasil yang didapat justru ketidakadilan yang mudah dijumpai dalam realitas karena pemaksaan solusi tersebut.

Hal inilah yang dimaksud Badiou sebagai sebuah usaha yang sia-sia dalam membangun teorisasi pada politik seperti apa yang telah dilakukan oleh Negara. Adanya teori terhadap bangunan “politik” yang didasari hanya sebatas kepentingan, membuat politik tidak akan pernah dikenal sebagai pikiran yang produktif, politik selalu berada dalam topeng regulasi yang selalu berusaha untuk menyatukan keberagaman tanpa melihat adanya kekosongan, infinitas dan ketidamungkinan dalam menyatukan hal tersebut.

Singkatnya, Politik tidak pernah dipekerjakan dalam ruang pendekatan akan adanya infinitas dan tatanan *real*, namun justru selalu berusaha untuk memfinalisasi fakta mengenai adanya ruang tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis melihat limit sebagai metode yang mendukung relasi politik dan keadilan. Melalui limit, konversi politik ke etika menjadi semakin jelas tujuannya. Limitasi adalah metode yang memfasilitasi keadilan untuk selalu mungkin hadir dalam pikiran politik pada sebuah relasi kehidupan bersama.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sebuah komunitas memang tidak akan pernah selesai, begitu juga dengan solusinya, namun yang pasti adalah melalui limit, subjek politik mampu menjadikan keadilan sebagai aksioma yang mendekati titik permasalahan sekaligus memberikan turunan yang *real* terhadap permasalahan yang dihadapi, bukan justru membuat subjek politik berhadapan dengan sesuatu yang tidak tentu.

Selanjutnya, keadilan bukanlah sesuatu yang hadir dalam sebuah tatanan masyarakat yang stabil, keadilan juga bukan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu pola keteraturan kehidupan suatu kelompok. Bagi Badiou (2003), seharusnya , “*justice is the philosophical name of the inconsistency, for the state or society, of any egalitarian political orientation*”. (p. 70).

Sehingga, apa yang dikemukakan melalui teori limit adalah sebuah cara untuk memperlihatkan bahwa keadilan sebagai sebuah aksioma dalam tindakan politik. Melalui limit *generic justice* ditransformasikan pada sebuah tindakan,

pada sebuah argumen, ataupun pada sebuah eksekusi yang dipaparkan pada keberagaman yang ada. Pendekatan yang dihasilkan membuat kata solusi disini tampaknya berubah menjadi kata lain yakni, konklusi. Keadilan bukanlah sesuatu yang hadir dan diraskan begitu saja, namun keadilan hanya dipresentasikan pada sebuah tindakan dimana subjek politik didalamnya bertanggung jawab untuk menggunakan akal kehidupan bersamanya untuk memutuskan kebenaran tersebut, atau justru tidak menerimanya sama sekali.

Disinilah letak lain pemahaman penulis tentang konsep keadilan yang diartikan oleh Badiou. Keadilan adalah bagian dari kontingensi, afirmasi terhadap infinitas, dan kekosongan yang hadir dalam setiap masyarakat. Keadilan bukan permasalahan distribusi kesejahteraan secara mutlak melalui sebuah regulasi, namun lebih dari itu, keadilan adalah wujud dari pikiran politik yang semakin memberi makna akan ke-kita-an itu sendiri. Keadilan memang tidak akan pernah selesai dalam sebuah kehidupan bersama, namun melalui sebuah limitasi, subjek politik hendaknya juga selalu berani untuk berhadapan dengan potensi keadilan, dan tentunya limitasi tersebut membuat subjek politik mampu mewujudkan keadilan secara *real*, bukan keadilan yang tertanam dalam sebuah sistem.

4.4 Ikhtisar

Konsep kebaruan yang dihasilkan oleh kesetiaan oleh subjek politik adalah suatu hal penting dalam menegaskan kembali kerangka politik dan relasinya dengan keadilan. Dalam fakta sosial kita memang tidak dapat dilepaskan dari proses kebaruan yang begitu cepat seiring pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang kehidupan. Namun bagaimana dengan politik?, tampaknya kebaruan memang juga berlaku, berbagai hal baru tercipta dalam naungan teknologi, politik tampaknya bersinergi dengan aturan-aturan baru dalam rangka terciptanya tertib sosial.

Kebaruan tersebut tidak lain juga disebabkan oleh retakan-retakan yang akan selalu berada dalam setiap bagian masyarakat, hingga pada akhirnya kita juga telah terbiasa dengan retakan tersebut.

Namun apakah setiap kebaruan, khususnya dalam politik memang seharusnya menjadi “kebaruan”? Dalam pemahaman penulis, begitu cepatnya

proses kebaruan membuat kita justru tidak mengenali lagi tentang kebaruan apa yang sedang dialami ataupun sedang dihadapi. Ketidakmampuan itu pada akhirnya membuat manusia hidup bukan lagi sebagai subjek politik, manusia hanya sebatas agen perubahan tanpa mengetahui ataupun “menikmati” perubahan tersebut.

Bagi penulis, hal ini bukan permasalahan pentingnya sebuah esensi dalam kerangka filsafat yang diusung oleh Badiou, namun lebih kepada sebuah evaluasi yang hendaknya hadir dalam setiap perubahan yang dikerjakan. Dengan artian, setiap tindakan politik hendaknya juga diiringi oleh hadirnya keadilan didalamnya. Keadilan menjadi bagian penting agar kesetiaan yang dimiliki oleh subjek politik tidak sia-sia setelah terciptanya sebuah kebaruan.

Oleh karena itu, limitasi adalah suatu argumen yang menegaskan pentingnya evaluasi tersebut. Apa yang selama ini kita lihat dalam fakta sosial mengenai kebaruan yang tidak diiringi oleh sebuah evaluasi hanya berujung kepada ketidaktentuan orientasi pikiran politik didalamnya. Kegagalan, kemunduran, tidak adanya prestasi mungkin adalah kata-kata yang sering mewakili apa yang sebenarnya terjadi dalam politik tanpa sebuah evaluasi tersebut.

Singkatnya, berupaya untuk menghadirkan sesuatu yang baru bukan berarti membuat kita lupa akan apa yang telah dihasilkan. Evaluasi melalui sebuah limitasi adalah sebuah kemungkinan agar subjek politik memang eksis sebagai subjek politik, bukan agen dari “tekno-politik”.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa pernyataan sebagai bagian kesimpulan. Pertama, penjelasan Badiou mengenai filsafat politik dengan dasar matematika sebagai ontologi menegaskan bahwa matematika hendaknya bukan sekedar dilihat sebagai ilmu pasti yang fungsional dalam relasinya dengan sains, namun matematika itu sendiri adalah suatu bahasa yang dapat dilekatkan dengan berbagai hal, termasuk politik. Melihat matematika sebagai bahasa dalam menjelaskan politik juga menjadikan politik bukan hanya berkuat pada statistika penyebaran kekuasaan, ataupun probalitas mengenai representasi suara masyarakat di parlemen. Namun lebih dari itu, pengenalan matematika dalam konteks ini adalah sebuah upaya untuk melihat lebih dalam “prosedur” yang hendaknya bekerja dalam sebuah pikiran politik.

Dalam hal ini, prodesural yang dijelaskan oleh Badiou melalui sistematika matematis tersebut membentuk sebuah pikiran mengenai masa depan politik yang masih mungkin dilekatkan dengan kata optimis. Optimisme tersebut bukan terletak pada adanya kepastian mengenai finalitas yang dicapai oleh “kita”, namun justru terletak pada suatu kebaruan yang hadir dalam rangkaian infinitas kehidupan bersama

Konsep intervensi yang diadopsi melalui metode *forcing*, dan konsep limit yang dibicarakan sebelumnya adalah sebuah bukti bahwa kita selalu mempunyai kekuatan untuk menciptakan pasar politik yang didasari pada pikiran, bukan lagi terjun kepada politik yang bermain dalam aspek kepentingan semata. Dengan artian, dua konsep matematika tersebut “memaksa” adanya diferensiasi dalam *society* mengenai politik. Intervensi dan limitasi adalah jalan dimana *being* mampu memproduksi himpunan-himpunan baru yang keluar dari rezim himpunan kuasa yang tidak pernah melihat adanya kebaragaman tersebut.

Namun tentunya adanya himpunan baru tersebut bukan sekedar sebuah gelembung (*bubble*) yang timbul secara militan namun juga lenyap begitu saja, namun melalui adanya intervensi dan limitasi membuat kebaruan tersebut juga

telah *dipersiapkan* tentang apa yang selanjutnya hendak dibangun dalam relasi politik. Inilah yang dimaksud dengan hadirnya etika sebagai kata penghubung antara keberagaman yang membentuk “kita” tersebut. Kesetiaan yang telah menjadi modal dalam prosedur tersebut membuat evaluasi tentang orientasi politik selalu dimungkinkan dalam sebuah percakapan politik, tanpa menutup kemungkinan adanya kebaruan lain yang hadir dalam perjalanan selanjutnya. Kebenaran mungkin saja dapat ditunda, namun penundaan tersebut hanyalah sebuah momen dimana *being* menghargai politik sejenak agar mereka tidak berhadapan dengan sesuatu yang “tidak tentu”.

Kedua, jika kita melihat situasi politik saat ini, sebagai contoh adalah apa yang terjadi di Perancis dimana sosok sosialis Francois Hollande berhasil memenangkan kursi presiden Perancis mengalahkan Nikolas Sarkozy dapat kita refleksikan dengan skripsi ini. Dengan artian, situasi tersebut mungkin bagi sebagai adalah situasi dimana partai sayap kiri kembali menunjukkan tajinya di Perancis, namun apakah Badiou melihat hal tersebut sebagai wujud dari politik sebagai pikiran?.

Tampaknya disini kita dapat melihat sisi konsistensi Badiou terhadap praktek politik saat ini, terutama di Perancis meskipun sosialis berhasil memenangkan pemilu. Dalam sebuah artikel guardian Online dijelaskan sosok Badiou yang selalu mengkritik tajam, baik Sarkozy maupun Hollande sendiri, Badiou digambarkan sebagai sosok yang diwakli dengan frase *excoriator of Sarkozy and Hollande*. Hal ini tidak lepas dari regulasi di Perancis yang bermasalah dengan imigran. Banyaknya regulasi yang justru menafikan fakta bahwa Perancis adalah negara yang beragam dan dibentuk oleh berbagai suku bangsa pendatang adalah salah satu kritik tajam dari Badiou terhadap politik perancis yang sampai saat ini masih belum memberikan pikiran terhadap isu tersebut.

Begitu juga dengan pandangannya terhadap sosialis Francois Hollande yang dalam pandangan Badiou bukanlah sebuah prestasi atas gambaran *real politic*. Baginya tampak sangat sulit menemukan situasi tersebut, sekalipun di tangan sosialis. Badiou tetap konsisten dengan diferensiasinya terhadap *truth* dan *state*, sehingga kata politik tampaknya tidak akan pernah pantas atau terlalu

mewah untuk disematkan pada pundak *state*. Pandangan ini tentunya akan selalu dapat diperdebatkan, khususnya dalam hal adanya pertanyaan mengenai bagaimana kita menjalankan politik yang seharusnya, jika tidak dalam sebuah pemerintahan, lantas dimana politik dapat dimanefestasikan?. Bagi penulis, penjabaran yang telah dijelaskan dalam tulisan ini membawa pada suatu pandangan bahwa politik akan selalu bersifat emansipatoris, ia tidak pernah selesai, dan jika memang suatu usaha politik berhasil menduduki suatu jabatan, maka *politic has been vanished*.

Filsafat politik yang diperkenalkan oleh Badiou adalah gagasan dimana kita semua hendaknya selalu dapat mengambil jarak dengan *state*, karena dengan adanya jarak tersebut politik selalu muncul dalam kebaruan, muncul sebagai suatu yang khas dari *being*, sebagai sesuatu yang beriringan dengan hadirnya *event*. Evaluasi terhadap *state* adalah tugas filsafat yang tidak akan pernah berhenti, ia bersifat universal, tidak peduli siapa yang sedang duduk dalam *state* itu sendiri.

Jika hal diatas berada dalam konteks Perancis, maka kita juga dapat menghubungkannya dengan situasi di Indonesia saat ini. Dalam hal ini saya mencoba mengutip pemikiran dari Robertus Robert (2011) yang menjelaskan bahwa politik di Indonesia malah tidak lebih baik dari gambaran mengenai fakta tentang praktek politik eropa saat ini. Jika pada zaman Plato terdapat distribusi bagian dalam setiap masyarakat dimana yang memiliki logos berhak mendapatkan dan menentukan bagian dari polis, maka di Indonesia justru sebaliknya, yang berpolitik adalah orang yang tidak memiliki logos, *karena kami tidak memiliki logos maka kamilah yang berhak berpolitik!* Justru kami tidak memiliki pikiran maka kamilah yang boleh berpolitik. Situasi tersebut semakin menegaskan *interest* hanyalah satu-satunya hal yang tersisa di politik Indonesia saat ini. Alih-alih adanya gagasan tentang keadilan dan kesetaraan, pikiranpun untuk sejenak tidak dapat hadir dalam bagian tersebut, semua hanya berujung kepada penyingkiran yang memiliki logos, dan digantikan oleh pertunjukkan sosok yang hanya dibangun atas dasar uang, media, hingga sosok religius.

Sehingga, dengan kejelasan situasi tersebut, maka posisi politik sebaagi pikiran juga semakin menjadi jelas. Filsafat dalam konteks ini memiliki *tanggung jawab* untuk menghadirkan perbedaan tersebut dalam demokrasi Indonesia,

dengan catatan, pikiran dan keadilan adalah pra-syarat untuk menghadirkan itu semua dengan berbagai pendekatan.

Ketiga, secara teknis, limit adalah konsep yang dapat menegaskan pemikiran Badiou mengenai adanya sisi etika dalam politik. Limit memberi kemungkinan untuk keadilan dan kesetaraan hadir sebagai sebuah nama yang hendak diwujudkan dalam relasi kehidupan bersama setelah terbentuknya suatu himpunan baru melalui intervensi. Limit adalah konsep yang mengkalkulasikan suatu permasalahan dalam rangka penegasan adanya infinitas yang tidak dapat dikalukasikan secara final. Keadilan yang hadir dalam limitasi tersebut adalah adalah suatu upaya untuk membuktikan bahwa politik masih memiliki harapan untuk tidak tenggelam dalam kebodohan praktek politik suatu rezim pemerintahan. Mengutip salah satu kalimat dalam film *V for Vendetta*, “...*di balik topeng ini lebih dari sekedar daging. Tapi ada pemikiran, dan pemikiran itu kebal peluru..*”.

Being memang selalu dihadapkan pada rezim yang mengekang keberagaman tersebut, dan merepresentasikannya menjadi satu kesatuan, namun sejarah juga membuktikan bahwa *being* selalu berusaha untuk keluar dari penjara rezim tersebut. *e(V)ent* adalah material yang menciptakan kebaruan tersebut, sehingga yang menjadi tugas *being* adalah apakah mereka mampu memahami *event* sebagai sebuah momen untuk menciptakan kebaruan, atau malah tidak menyadari *event* tersebut sama sekali.

5.2 Catatan Kritis dan Saran

Sebagai bagian terakhir dari tulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan sedikit catatan kritis sekaligus saran bagi yang mungkin juga tertarik pada pemikiran Badiou ataupun filsafat kontemporer secara umum. Untuk membaca Badiou satu hal yang mutlak perlu dipahami adalah ontologi dari Badiou itu sendiri, karena melalui hal tersebut Badiou menjelaskan filsafatnya dalam beberapa bagian lain, yakni filsafat dan politik, filsafat dan psikoanalisa, filsafat dan cinta, filsafat dan film, hingga filsafat dan seni. Semua hal tersebut berawal dari pembahasan mengenai konsep ontologi tersebut.

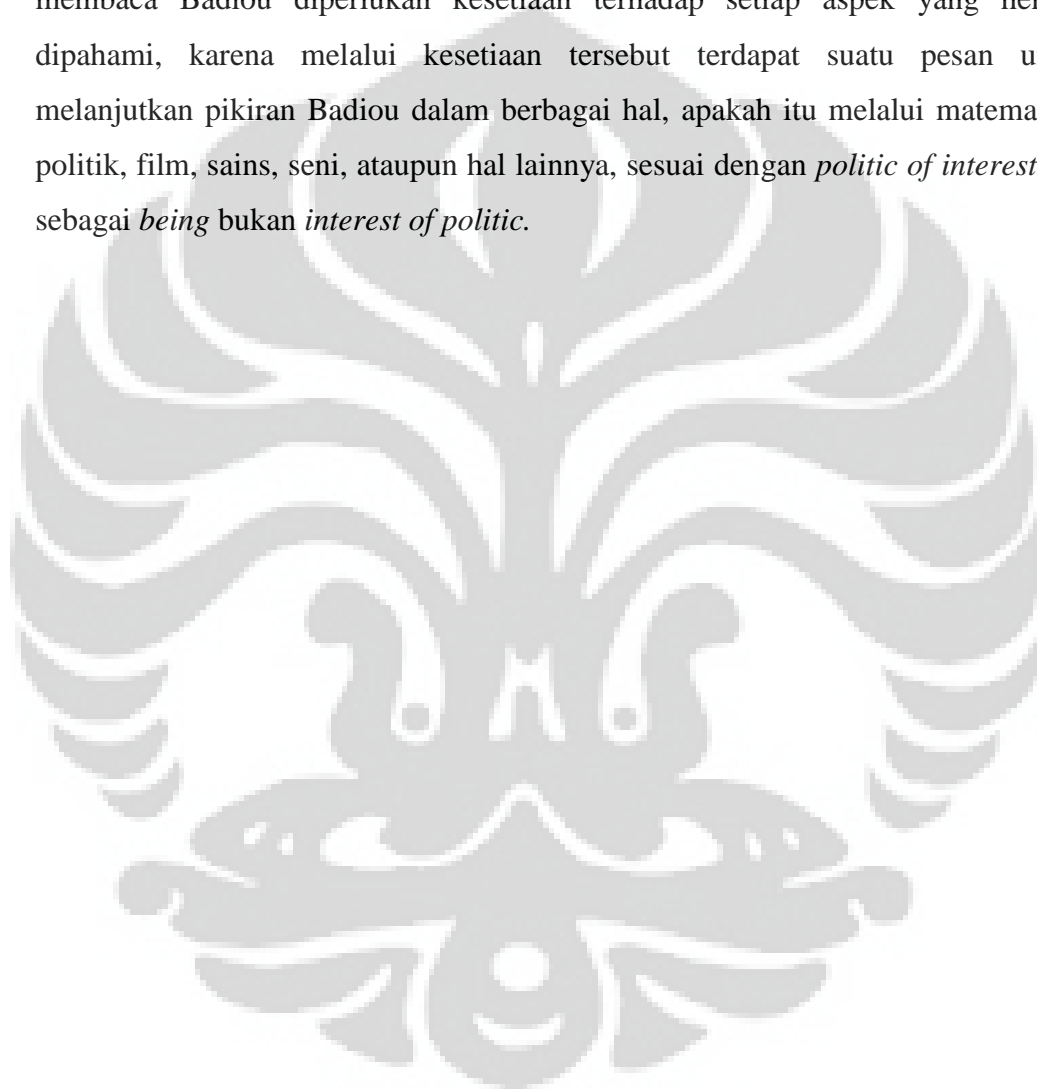
Tentu ruang debat yang paling menonjol dalam pembahasan ontologi tersebut adalah mengenai konsep matematika yang digunakan Badiou dalam menjelaskan filsafatnya. Dalam hal ini, argumen mengenai Badiou yang menggunakan *pseudo-mathematic* dalam menjelaskan setiap filsafatnya adalah hal yang paling sering didengar dalam kritik terhadap Badiou. Namun hal penting yang harus diingat adalah kita hendaknya tidak langsung terjebak pada kritik tersebut. Mengambil jarak dengan melakukan sebuah kritik tentu adalah tugas penting dalam sebuah perdebatan filsafat, namun bukan berarti kita juga tidak mempunyai titik yang jelas terhadap hal apakah kita harus selalu mengkritik suatu hal atau justru berada dalam sisi menegaskan ide tersebut melalui suatu gagasan baru.

Dengan artian, dalam konteks pembacaan terhadap Badiou, penulis sepakat bahwa matematik yang menjadi basis ontologi filsafat Badiou adalah sebuah hal yang penting untuk dipahami sebagai pintu masuk terhadap pembacaan filsafatnya. Adalah sebuah kedangkalan ketika kita mengabaikan matematika itu sendiri dalam konteks Badiou, filsafat menjadi sebuah pembicaraan tentang kebaruan namun kehilangan sebuah *fondasi* yang ketat tentang argumen akan kebaruan tersebut. Hal ini disebabkan bahwa politik adalah sesuatu yang memiliki watak aksiomatik, politik selalu berurusan dengan sesuatu yang kolektif, dan bagaimana yang kolektif tersebut dapat direlasikan dalam suatu relasi yang militan. Disinilah pada dasarnya teori himpunan itu menjadi suatu hal yang mampu menjelaskan faktisitas tersebut. Matematika dalam konteks ini teori himpunan hadir di depan sebuah proposisi politik dalam rangka menjelaskan kemajemukan sekaligus bagaimana mengatasi adanya kekurangan atas kemajemukan itu sendiri.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa kehadiran matematika menjadi sangat penting karena ia bukan sekedar konsep yang dilekatkan begitu saja dalam setiap penjelasan politik itu sendiri. Pemodelan melalui teori himpunan memperlihatkan bahwa filsafat kontemporer bukan sekedar produksi atas sesuatu yang baru, namun yang lebih penting adalah bagaimana kebaruan tersebut hadir melalui sebuah kerangka yang jelas, ketat, serta mempunyai implikasi yang jelas dalam kehadirannya pada suatu ruang dan waktu tertentu. Singkatnya, justru ketika

filsafat hanya berselimum atas azas kebaruan tanpa sebuah metodologi yang ketat, maka disitulah sebenarnya akar *pseudo-truth* menjaral dengan subur.

Selanjutnya, untuk memahami filsafat tampaknya konsep kesetiaan juga perlu hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Kesetiaan membuat kita selalu mungkin untuk mendapatkan hal-hal yang baru tanpa harus menutup kemungkinan adanya relasi dengan *the other*. Dengan artian, dalam konteks membaca Badiou diperlukan kesetiaan terhadap setiap aspek yang hendak dipahami, karena melalui kesetiaan tersebut terdapat suatu pesan untuk melanjutkan pikiran Badiou dalam berbagai hal, apakah itu melalui matematika, politik, film, sains, seni, ataupun hal lainnya, sesuai dengan *politic of interest* kita sebagai *being* bukan *interest of politic*.



GLOSARIUM

Ada : Segala yang hadir dalam sebuah situasi, dalam hal ini ada dapat dikatakan sebagai elemen, baik yang terhitung, atau tidak. Bagi Badiou pengertian Ada yang paling mendasar adalah kekosongan dan inkonsistensi dalam sebuah himpunan/situasi.

Aksioma : Pendapat yang dijadikan dalil pertama sekaligus diterima sebagai kebenaran umum tanpa memerlukan pembuktian. Dalam konteks Badiou, politik juga memiliki aksiomatik yang berarti politik selalu dimulai dengan penetapan posisi terhadap sebuah situasi.

Continuum Hypothesis : suatu pandangan dalam matematika dimana himpunan bilangan riil adalah sebuah rangkaian yang tak hingga, namun dalam sisi lain juga disebut sebagai konsep yang tidak dapat diputuskan definisinya secara formal.

Filsafat Politik : Dalam tulisan ini, penulis sering memberi tanda kutip pada frase ini, “filsafat Politik”. Dengan artian, secara umum ia diartikan sebagai bentuk pemikiran yang melihat politik secara eksternal terhadap politik itu sendiri. Karena berangkat dari pijakan tersebut, maka politik lebih condong diatur oleh suatu yang bersifat normatif, dimana pada akhirnya terdapat sebuah gambaran mengenai politik yang baik, politik yang memadai. Hal inilah yang kemudian dikritik oleh Badiou dalam pemikiran politiknya.

Generik : Sesuatu yang bersifat umum, sesuatu yang menjadi basis situasi. Namun melalui generiklah, kebenaran menjadi sesuatu yang selalu mungkin untuk hadir.

Himpunan Bagian (subset) : himpunan x yang berada dalam himpunan y , dikarenakan setiap elemen dari x adalah bagian dari y . sehingga himpunan x adalah bagian dari y . contoh : $\{ 1, 2, 3 \} \subseteq \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$

Himpunan kosong (*null set*) : dalam bahasa matematika diartikan sebagai himpunan yang memiliki kardinal $= 0$, atau biasa dilambangkan dengan $\{ \}$. Dalam konteks Badiou, himpunan kosong juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang selalu hadir dalam setiap situasi. Kekosongan menjadi modal dalam membangun setiap himpunan karena secara universal menjadi presentasi atas situasi.

Himpunan Kuasa (*power set*) : Himpunan kuasa (*power set*) dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A , termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dalam hal ini, juga dapat diartikan sebagai himpunan pangkat yang dinotasikan dengan $P(A)$. contoh : Jika $A = \{ 1, 2 \}$, maka $P(A) = \{ \emptyset, \{ 1 \}, \{ 2 \}, \{ 1, 2 \} \}$

Kategori situasi : Badiou membaginya dalam 3 jenis, 1). Normal, dimana semua elemen yang terpresentasi, juga direpresentasikan. 2). Khusus, dimana yang ada hanyalah representasi tanpa presentasi. 3). Singular, yakni yang ada hanya presentasi tanpa representasi.

Kebenaran : sesuatu yang baru, hadir dalam situasi melalui sebuah peristiwa. Kebenaran juga bukan suatu situasi yang final, namun terus mempunyai kemungkinan untuk memecahnya dalam partikularitas yang lainnya.

Keberagaman inkonsisten (*Inconsistency Multiplicity*) : keberagaman yang mendasari setiap situasi, dan belum dihitung sebagai sebuah kesatuan oleh prosedur *count as one*. Badiou juga menegaskan konsep ini sama halnya dengan kekosongan itu sendiri, yang murni sebagai sebuah presentasi.

Keberagaman konsisten (*Consistent Multiplicity*) : kejamakan yang sudah dilabeli dengan satu kesatuan oleh prosedur *count as one*.

Kesetiaan (*Fidelity*) : sifat/modus subjek yang berperan penting dalam menciptakan sebuah kebenaran. Kesetiaan berada dalam situasi yang satu, sebelum akhirnya dengan terus berusaha untuk keluar dari rezim representasi kesatuan tersebut.

Ketakterpilihan (*Indiscernibilit*) : adalah sifat lain dari sebuah kebenaran. Ia tidak dapat dikategorikan dalam berbagai kosakata yang terjadi saat itu. Kebenaran memang sesuatu yang baru, tidak diketahui oleh suatu kategori situasi.

Ketakterhinggaan (*Infinity*) : ciri khas dari setiap situasi. Badiou menegaskan tidak ada finalitas dalam suatu situasi, ia akan terus berubah, menjadi sesuatu yang baru dengan elemen yang berbeda.

Keberhinggaan (*finite*) : situasi dimana subjek dapat didefinisikan dalam suatu pengertian. Ia bersandar pada realitas bukan pada sesuatu yang *real*.

Limit : suatu teorema dalam matematika yang mencoba memberi dukungan pada konsep kalkulus secara praktis. Sulit untuk memberikan sebuah definisi yang formal tentang limit, namun secara sederhana, limit adalah suatu metode yang membuat suatu fungsi tidak mendapati hasil yang tidak tentu dalam konteks matematika, atau dapat disebut sebagai mencari turunan yang riil.

Metapolitik : konsep yang ditawarkan oleh Badiou dalam sebagai oposisi terhadap konsep filsafat politik. Badiou menegaskan bahwa politik adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan norma normatif eksternal, namun berasal dari pikiran internal sehingga politik bukan sesuatu yang dapat dilekatkan begitu saja pada setiap hal. Mengingat *thought* juga tidak dapat dilihat disetiap hal.

Model : dalam konteks matematika, model adalah gambaran dimana teorema suatu teori diinterpretasikan dalam sebuah bahasa berdasarkan aksioma-aksioma teori

tersebut. contoh yang paling populer mengenai hal ini adalah model non-Euclidean dalam geometri.

Ontologi : teori tentang ada. Bagi Badiou, ontologi sama halnya dengan situasi itu sendiri. Sehingga segala yang ada berada dalam situasi.

Pemaksaan (*Forcing*) : sebuah metode dalam teori model yang bertujuan untuk memilah suatu hal dari kondisi *generic set* nya menjadi himpunan yang baru. *Forcing* menciptakan suatu situasi dengan nama yang baru sekaligus elemen yang berbeda. Inilah yang kemudian diadopsi oleh Badiou dengan nama yang berbeda, yakni intervensi dalam konteks politik.

Peristiwa : suatu elemen yang keanggotaannya dalam situasi tidak dapat dibuktikan oleh internal situasi itu sendiri. Peristiwa adalah suatu suplemen yang menciptakan situasi yang baru, situasi yang terlepas dari himpunan dimana sebelumnya mereka berrnanung.

Presentasi : modus kehadiran langsung sebuah situasi, sama artinya dengan menjadi elemen sebuah himpunan. Dalam matematika, biasanya dilambangkan dengan notasi \in .

Representasi : modus kehadiran yang tak langsung. Sama artinya dengan menjadi bagian pada sebuah hal. Dalam matematika, dilambangkan dengan notasi \subseteq . Badiou menegaskan bahwa representasi mengacu pada *ordering* elemen-elemen berdasarkan kriteria tertentu.

DAFTAR REFERENSI

BUKU :

Badiou, Alain. (2007). *Being and Event* (Oliver Feltham, Penerjemah). New York: Continuum.

------. (2008). *Conditional* (Steven Corcoran, Penerjemah). London: Continuum.

------. (2001). *Ethics: An Essay on the Understanding of Evil* (Peter Hallward, Penerjemah). London: Verso.

------. (2004). *Infinite Thought* (Oliver Feltham dan Justin Clemens, Penerjemah). New York: Continuum.

------. (2006). *Metapolitic* (Jason Barker, Penerjemah). London: Verso.

------. (2008). *Number and Numbers* (Robin Mackay, Penerjemah). London: Polity press.

------. (2007). *The Concept Of Model* (Zachary Luke Fraser dan Tzuchien Tho, Penerjemah). Melbroune: re-press.

------, and Slavoj Zizek. (2009). *Philosophy in the Present*. Cambridge: Polity press.

Derrida, Jacques. (1993). *'Politics and Friendship: An Interview with Jacques Derrida'*, (Enn Kaplan and Michale Sprinker, Penerjemah). London and New York: Verso.

Gillespie, Sam. (2008). *The Mathematic Of Novelty : Badiou's Minimalist Metaphysics*. Melbroune: re-press.

Marchart, Oliver. (2007). *Taking On The Political*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Norris, Christopher. (2009). *Badiou's Being and Event*. New York: Continuum.

Suryajaya, Martin. (2011). *Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme*. Yogyakarta: Resist Book.

Devlin, Keith. (1993). *The Joy of Set*. New York: Springer.

------. (1998). *The Language of Mathematic*. New York: H.Freeman and Company.

Miller, Arnold W. (1995). *Descriptive Set Theory and Forcing : How to prove about Borel sets the hard way*. University of Wisconsin.

Hobbes, Thomas. (1967). *Leviathan*. London: Cambridge press.

Hardiman, F.Budi, et al., ed. (2011). *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: www.srimulyani.net.

----- (2007). *Filsafat Modern*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

MAKALAH DAN ARTIKEL

Woodin, Hugh. (2001). The Continuum Hypothesis, Part I. *Notices of the AMS* 48 : 6 . 567-568.

Jech, Thomas. (2008). What is Forcing?. *Notices of the AMS* 55 : 6. 691-693.

“Limit Fungsi.” *Wikipedia Indonesia*. Vers. 25. Apr. 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/limit_fungsi.

“A Life in Wrting.” *Guardian* 19 May 2012. 19 May 2012 <http://www.guardian.co.uk/culture/series/a-life-in>.

“Limit.” *Encyclopedia of Mathematic*. Vers. 11.2.7. Feb. 2011. Encyclopedia of Mathematic. 07 February 2011 <http://www.encyclopediaofmath.org/index.php?title=Limit&oldid=16444>.

FILM

Frayman, Pamela, dir and prod. (2008). *How I met Your Mother (season 4)*. Twentieth Century Fox film Corporation.

Mcteigue, James, dir. (2006). *V For Vendetta*. Warner Brother.